

# **Pembangunan Ekonomi Pasca Bencana Gempa Bumi Tahun 2010 dan Implikasinya pada Penciptaan Lapangan Pekerjaan di Sumatera Barat.**

**Oleh : Nurtati**

(Ketua dan Dosen STIE SUMBAR Pariaman)

## **ABSTRACT**

*The aim of the research was to understand the description of relationship among the variables under the studies. Specifically, the research studied relationship among variables of regulation, allocation of the national and regional budgets, regional investment, the governance of the local government, the society participation, and the role of business corporates towards the economic growth after the disaster in West Sumatera. Besides, the research aim was also to understand the implication of economic growth towards the job creation.*

*The reserach population was the perception mean of the managing authorities of the disaster for the economic development in West Sumatera that numbered 800 personnels. Of the population number, 270 samples were drawn through purposive random sampling. Data analysis employed descriptive and verified methods. Activities of data management covered aspects of data collection, tabulation, analysis, hypothesis testing, and data interpertration for the scientific information. For the general relationship desain, the data analysis used path analysis.*

*Research results indicated that there were significant contribution in terms of their simultaneous as well as partial of regulation, allocation of the national and regional budgets, regional investment, the governance of the local government, the society participation, and the role of business corporates towards the economic growth after the disaster in West Sumatera. Meanwhile, the economic growth affected significantly towards job creation.*

*The research implication brought about suggestions that the Regional Government of West Sumatera set up regulation to foster the investment, increase the budget allocation, and better the infra structure, Besides, the society participation be expanded especially in economic development sectors in order that it widened the job availability.*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu penyebab lemahnya daya saing Indonesia, dan daya saing infrastruktur diantaranya secara alamiah Indonesia merupakan negara atau daerah bencana, baik bencana gempa bumi, tsunami, gunung api dan bencana lainnya, sehingga hasil pembangunan yang telah dicapai hancur seketika oleh bencana itu sendiri. Dengan demikian banyak korban dan biaya, serta pengorbanan yang terbuang secara sia-sia. Dalam rentang lima tahun, sejak 2004 hingga 2009, terdapat 10 bencana besar dan puluhan bencana lainnya telah mengakibatkan kerugian hampir Rp150 triliun. Kerugian ini belum termasuk tiga bencana terakhir yakni Wasior, Mentawai, dan

Gunung Merapi. Max Pohan (2010). Sepuluh bencana besar berikut kerugian yang dihitung pemerintah tersebut yakni, gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias pada Desember 2004 sebesar Rp 41,4 triliun, gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Mei 2006 Rp 29,1 triliun dan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo Rp7,3 triliun. Selanjutnya, tsunami Pangandaran, Jawa Barat pada Juli 2006 sebesar Rp 402,7 miliar, banjir Jakarta pada Februari 2007 sebesar Rp 5,16 triliun, gempa bumi Sumbar pada Maret 2007 sebesar Rp 1,08 triliun serta gempa bumi Bengkulu dan Sumbar pada September 2007 sebesar Rp1,79 triliun.

Informasi tentang kejadian gempa besar di Indonesia dapat dilihat pada di bawah ini :

**Tabel 1. Daftar Gempa Bumi Dahsyat 2004-2009 di Indonesia**

No.	Waktu Dan Tempat	Kekuatan Gempa	Jumlah Korban (tewas)
1.	6 - 2 - 2004, Nabire	6,9 SR	34
2.	12 - 11 - 2004, Alor	6 SR	27
3.	26 - 11 - 2004, Nabire	6,4 SR	30
4.	26 - 12 - 2004 Nias dan Simeulue	9 SR dan tsunami	131.029
5.	28 - 3 - 2005, Nias dan Simeulue	8,7 SR	900
6.	27 - 5 - 2006, Yogyakarta,	6,2 SR	30
7.	17 - 7 - 2006 Pangandaran	7,7 SR dan tsunami	600
8.	21 - 1 - 2007 Sulawesi	7,3 SR	4
9.	6 - 3 - 2007 Sumatera	6,3 SR	250
10.	12 - 9 - 2007 Padang	8,4 SR	50
11.	13 - 9 - 2007, Sumatera	7,8 SR	4
12.	2 - 9 - 2009 Tasikmalaya	7,3 SR	100
13.	30 - 9 - 2009 Sumatera	7,6 SR	6.234

Sumber : Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2010 [http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa\\_bumi\\_Sumatera\\_Barat\\_2009](http://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Sumatera_Barat_2009)

Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan bahwa kejadian gempa di Padang merupakan bencana yang dikategorikan sebagai bencana gempa yang besar di Indonesia. Selain itu salah satu aspek lain yang sangat mempengaruhi rendahnya daya saing adalah diduga adanya keterbatasan dan kelemahan peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, tata kelola pemerintahan yang baru, dan pelaksanaan pelayanan publik yang prima.

Pembangunan daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Barat selalu mengalami pasang surut, hal ini dikarenakan secara spesifik Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah bencana gempa dan tsunami, sehingga hasil pembangunan, khususnya infrastruktur yang telah dibangun rusak kembali oleh terjadinya gempa. Gempa yang terjadi pada tahun 2009 merupakan gempa yang sangat besar yang membawa korban nyawa yang banyak dan kehancuran infrastruktur yang sangat dahsyat (tabel 1.2). Namun demikian disamping gempa mengakibatkan bencana, akibat adanya bencana tersebut juga membawa pengaruh positif pula bagi kegiatan pembangunan atau rekonstruksi pasca bencana tersebut. Hal ini memberikan dampak pada perekonomian Sumatera Barat.

Prioritas pembangunan Sumatera Barat, merupakan implementasi dari visi pembangunan 2006-2007, dimana rumusan visi ini sebelumnya disusun dan ditetapkan berdasarkan kajian permasalahan, tantangan, serta potensi yang dimiliki. Rumusan visi pembangunan Sumatera

Barat 2006-2007, adalah ***Mewujudkan Sumatera Barat yang tangguh, bersih dalam semangat kebersamaan.***

Misi pembangunan Sumatera Barat tahun 2006-2010 sebagai berikut: 1). Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai tanggung jawab Bernegara dan Berbangsa, 2). Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, 3). Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Adapun prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2006-2010, terdiri dari 7 (tujuh) Agenda Prioritas pembangunan sebagai berikut :1). Agenda meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya, 2). Agenda membangun sumber daya manusia berkualitas, 3). Agenda menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, 4). Agenda membangun ekonomi yang tangguh dan berkeadilan, 5). Agenda mengembangkan infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan, 6). Agenda mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, 7). Agenda memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan.

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 5,93 persen dibanding tahun 2009. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada tahun 2010 mencapai 38,86 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp. 36,68 triliun dan Rp. 36,18 triliun. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDRB tahun 2010 naik sebesar

Rp. 10,49 triliun, yaitu dari Rp. 76,75 triliun pada tahun 2009 menjadi Rp. 87,22 triliun pada tahun 2010.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2010 meningkat 5,93% terhadap 2009, terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor bangunan 13,73% dan terendah di sektor listrik, gas dan air bersih 2,35%.

Selama tahun 2010, semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi yang mencapai 13,73 persen, diikuti oleh sektor pengangkutan dan telekomunikasi 9,91 persen, sektor jasa-jasa 9,17 persen,

sektor pertambangan dan penggalian 5,80 persen, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan 5,75 persen, sektor pertanian 3,66

persen, sektor perdagangan 3,48 persen, sektor industri pengolahan 2,51 persen, serta sektor listrik, gas dan air bersih 2,35 persen.

Adapun distribusi PDRB menurut sektor ekonomi atau lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan-hotel-restoran dan sektor jasa mempunyai peranan sebesar 57,62 persen pada tahun 2010.

Sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 23,84 persen, sektor perdagangan-hotel-restoran dan sektor jasa-jasa mempunyai peranan masing-masing sebesar 17,74 persen dan 16,06 persen.

Untuk lebih jelaskan dapat diperlihatkan pada Tabel 2 di bawah ini :

**Tabel 2. PDRB Menurut Lapangan Usaha 2008-2010 (dalam persen)**

No	Lapangan Usaha	2008	2009	2010
1.	Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan	24.49	23.95	23.84
2.	Pertam-bangan dan Penggalian	3.32	3.33	3.17
3.	Industri Pengolahan	12.12	12.09	11.69
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.22	1.17	1.06
5.	Konstruksi	5.56	5.63	6.30
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	17.66	17.84	17.74
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	15.06	15.21	15.41
8.	Keuangan, Real Estate	4.88	4.93	4.75
9.	dan Jasa Perusahaan	15.69	15.86	16.03
	Jumlah	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Sumatera Barat (2010)

Berdasarkan Tabel 2 tersebut di atas, memperlihatkan bahwa bencana gempa bumi yang terjadi, mengakibatkan aktivitas beberapa sektor pembangunan memperlihatkan penurunan, seperti sektor Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, serta Listrik, Gas dan Air Bersih. Sebagai mana diketahui bahwa sektor Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan menempati posisi pertama, hal ini menandakan bahwa sektor tersebutlah yang paling banyak menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembangunan ekonomi di Sumatera Barat. Sedangkan sektor konstruksi mengalami peningkatan yang berarti, hal ini dikarenakan terjadinya aktivitas pembangunan kembali infrastruktur yang hancur atau rusak karena terjadinya gempa bumi.

Gempa bumi merupakan gejala alam, berupa sentakan alamiah yang terjadi di bumi,

yang bersumber di dalam bumi dan merambat ke permukaan. Kejadian gempa dapat diramalkan dampak kerusakannya sesuai dengan besaran skala Richter. Salah satu upaya untuk mengatasinya perlu pengelolaan dampak bencana, yaitu perlunya *Disaster recovery planning* (Steven J. Carlson, 1998), *Disaster recovery planning (DRP)* merupakan perencanaan untuk pengelolaan secara rasional dan *cost-effective* bencana terhadap sistem informasi yang akan dan telah terjadi serta pemulihan pasca bencana. Adapun tujuan *DRP* adalah meminimumkan risiko dan optimalisasi kesinambungan entitas dalam menghadapi risiko bencana. Dengan demikian bagi pemerintah daerah (Pemda), *DRP* disusun bersama seluruh masyarakat setempat. *DRP* merupakan strategi antisipasi secara terencana dan berkesinambungan. Adanya diskontinuitas administrasi pemerintahan menyebabkan

diskontinuitas investasi masuk ke dalam Pemda tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2010 mulai menunjukkan arah pemulihan ditandai dengan tumbuhnya ekonomi sebesar 5,93 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 4,28 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 ini banyak digerakan oleh beberapa komponen PDRB yaitu konsumsi pemerintah tumbuh sekitar 15,53 persen, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sekitar 11,27 persen dan komponen ekspor tumbuh sekitar 16,56 persen. Tingginya komponen PMTB ini, karena meningkatnya proses rehabilitasi dan rekontruksi gedung-gedung, perkantoran, maupun gedung tempat

kegiatan usaha yang rusak pasca gempa tahun 2009. Sementara itu konsumsi pemerintah jauh meningkat dibandingkan pada tahun 2009 karena realisasi belanja yang jauh lebih tinggi, juga ditopang dengan cairnya hampir sebahagian besar dana bantuan gempa untuk rumah tangga di Kota Padang dan beberapa kota lain di Sumatera Barat (BPS Sumatera Barat, 2010).

Namun demikian hasil pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah, pengusaha dan masyarakat selama ini di Provinsi Sumatera Barat telah hancur karena bencana gempa bumi tahun 2010, sehingga sangat besar kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.

**Tabel 3. Nilai Kerusakan Dan Kerugian Akibat Bencana di Beberapa Negara dan Beberapa Daerah Di Indonesia.**

Negara / Daerah	Kejadian	Jumlah Korban Tewas	Kerusakan dan Kerugian (Triliun Rp.)	Kerusakan Dan Kerugian (Triliun Rp.) Harga Konstan 2006
Tsunami, Aceh	26 Des 2004	165.700	40,10	42,70
Gempa Bumi, Jawa Tengah dan Jogyakarta	27 Mei 2006	5.716	28,20	28,20
Banjir, Jabotabek	14 Feb 2007	-	5,15	-
Gempa, Sumatera Barat dan Bengkulu	12 Sep 2007	-	1,90	-
Tsunami, Thailand	26 Des 2004	8.345	19,8	21,1
Tsunami, Srilangka	26 Des 2004	35.399	13,1	14,0
Tsunami, India	26 Des 2004	16.389	11,2	11,8

Sumber : 1. Asia Disaster, preparedness center, Thailand, ECLAC, EM-DAT, World Bank.  
2. Bapenas, Penilaian, kerusakan dan kerugian Jawa Tengah, Jabotabek, Sumatera Barat dan Bengkulu

Berdasarkan tujuan penelitian, variabel yang diduga dominan dalam pambangunan ekonomi pasca bencana, yaitu : regulasi, ketersediaan anggaran baik pusat maupun daerah, besaran investasi di daerah, kemampuan tata kelola pemerintah, peran serta dunia usaha dalam pembangunan dan investasi daerah, serta

Permasalahan regulasi, di Indonesia merupakan masalah yang pelik, hal ini dikarenakan terlalu banyaknya regulasi yang dibuat, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah, disamping itu kadang kala satu regulasi dengan regulasi lainnya dapat bertolak belakang. Begitu juga tingkat implementasi regulasi yang sulit untuk dilaksanakan dan sering berimplikasi pada biaya operasional yang mahal, sehingga

peranan masyarakat yang kena musibah dalam membangun kembali tempat tinggal dan sarana pendukungnya atau masyarakat umum yang turut membantu membangun kembali pembangunan infrastruktu dan pembangunan ekonomi daerah di Sumatera Barat dalam waktu yang tidak terlalu lama.

regulasi dapat menjadi faktor penghambat dan biaya tinggi untuk pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Faktor utama, di antaranya aspek pendanaan pembangunan itu sendiri. Pendanaan pembangunan akan sangat bergantung pada ketersediaan dana yang dimiliki atau dana potensial yang dapat dicari, dan sejauh mana pengalokasian anggaran itu sendiri. Dalam

penelitian ini peneliti lebih menyoroti alokasi anggaran, yaitu meliputi besaran anggaran, dan proses serta prosedur pencairan anggaran. Sebagaimana diketahui bahwa bencana gempa bumi dan tsunami merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi dan bencana tersebut menimbulkan kerugian jiwa, fisik dan non fisik yang sangat dahsyat. Oleh karena itu jika pendanaan penanganan bencana melalui prosedur yang sebagaimana lazimnya pengeluaran dan pengelolaan dana yang umum, maka ini menjadi permasalahan yang tidak baik dan lamban. Guna memberikan optimalisasi peranan pendanaan tersebut, maka alokasi anggaran untuk penanganan bencana harus dilakukan secara spesifik, cepat dan memadai.

Berdasarkan hasil Survei *The Global Competitiveness Report 2007-2008*), ternyata masalah institusi di Indonesia masih menempati posisi ke 69 dari 131 negara, hal ini menandakan bahwa kelembagaan pemerintahan masih belum baik, ini dapat diperlihatkan oleh masih tinggi KKN dan masih belum baiknya pelayanan pada publik. Mengingat negara Indonesia dikategorikan pada negara berkembang, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab yang terbesar terhadap pelaksanaan pembangunan (*agent of development*), sedangkan pihak dunia usaha dan masyarakat sebagai pihak pendukung. Oleh karena itu peranan tatakelola pemerintahan harus betul-betul baik dan benar serta bertanggung jawab (*good governance*). Tuntutan tatakelola pemerintahan yang baik tersebut menjadi sangat penting dan sangat dituntut pada kondisi terjadinya bencana, dimana peran pemerintah menjadi sangat dituntut untuk menangani berbagai masalah yang terjadi akibat dari bencana tersebut secara cepat, tanggap, bekerja dengan sepenuh tenaga yang ada, dan tidak kenal lelah. Seluruh aparatur, saran dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah harus dikerahkan untuk menangani tindakan darurat akibat bencana tersebut.

Peranan dunia usaha dituntut untuk membantu pihak pemerintah dalam menangani bencana, dalam artian pengusaha yang mempunyai sumber daya; sumber daya manusia yang berpengalaman, maupun sumber kapital harus turut membantu penanganan bencana yang terjadi. Bantuan dunia usaha ini bukan saja bersumberkan pada pengusaha setempat, melainkan seluruh pengusaha di Indonesia yang

mau membantu korban bencana di Sumatera Barat tersebut. Berdasarkan pengalaman yang lalu ternyata bantuan dari pihak pengusaha tersebut sangat besar dan sangat berguna, dimana bantuan berupa; bantuan finansial, bantuan material, bantuan konsep, dan bantuan teknikal bersama tenaga yang berpengalaman.

Peranan masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan, terlebih-lebih pada peristiwa bencana. Berdasarkan pengalaman, banyak peristiwa bencana masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia turut membantu penanganan bencana gempa bumi dan tsunami. Sebagai contoh peristiwa gempa bumi dan tsunami di Aceh, hampir seluruh masyarakat dunia turut membantu penanganan gempa tersebut.

Begitu juga hal yang sama pada peristiwa gempa bumi dan tsunami di Sumatera Barat, mendorong para pengusaha dan masyarakat setempat, para pengusaha dan masyarakat seluruh Indonesia dan lembaga kemasyarakatan dunia turut membantu penanganan pasca gempa tersebut. Berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh masyarakat, diantaranya ; Bantuan finansial, Bantuan barang, Bantuan tenaga, bantuan – bantuan lainnya. Dengan demikian kelembagaan penanganan bencana harus dibentuk dengan melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur para pengusaha, dan unsur kemasyarakatan lainnya.

Tindakan tanggap darurat penanganan bencana hanya dapat dilaksanakan dengan optimal, apabila adanya akumulasi dari peranan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara bersamaan dalam partisipasinya untuk membangun daerah bencana di Sumatera Barat. Sedangkan untuk rekonstruksi pembangunan pasca bencana hanya dapat dilaksanakan dengan optimal, jika ketiga unsur tersebut mampu mengoptimalkan peran dan fungsi masing-masingnya, dan juga membangun sinergisitas guna menciptakan tumbuh kembangnya pelaksanaan investasi baru di daerah bencana tersebut. Dengan demikian akan mampu menumbuhkembangkannya aktivitas ekonomi daerah yang akan memberikan nilai-nilai positif bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, terutama dalam pemberian kesempatan kerja baru dan peningkatan pendapatan.

Berdasarkan uraian fenomena yang dipaparkan di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan mengambil judul penelitian : **Faktor-faktor yang mempengaruhi**

## **pembangunan ekonomi pasca bencana gempa bumi tahun 2010 dan implikasinya pada penciptaan lapangan pekerjaan di Sumatera Barat.**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh secara simultan dari variabel regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana.
2. Bagaimanakah pengaruh secara parsial dari variabel variabel regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana.
3. Bagaimanakah pengaruh dari variabel pembangunan ekonomi pasca bencana terhadap penciptaan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji besaran pengaruh secara simultan dari variabel regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji besaran secara parsial dari variabel regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji besaran pengaruh dari variabel pembangunan ekonomi pasca bencana terhadap penciptaan lapangan pekerjaan.

## **BAHAN DAN METODE**

### **Teori Ekonomi Pembangunan**

Dalam kamus ekonomi, kata pembangunan ekonomi dikenal dengan istilah “*Growth*” dan “*Development*” yang keduanya memberikan gambaran adanya peningkatan kemajuan. “*Economic Growth*” diartikan sebagai pertumbuhan dalam arti peningkatan hasil

produksi tiap orang, sedangkan “*economic development*” adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan perbaikan, pemerataan kesehatan, dan pendidikan bagi golongan penduduk yang rendah pendapatannya, oleh karenanya *economic growth* disebut sebagai pembangunan ekonomi (Soemardi Reksopoetranto, 1992,11). Pembangunan ekonomi juga mengandung pengertian mengenai perubahan, perubahan teknik produksi sehingga menghasilkan barang-barang yang lebih bermutu, perubahan pola kesempatan kerja, perubahan tingkat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perubahan perdagangan luar negeri, perubahan dalam kesejahteraan rakyat.

Pengertian ekonomi pembangunan sering disamakan dengan ekonomi pertumbuhan disamping ada yang membedakan (Yuyun Wirasmita, 2006:42). Menurutnya, yang membedakan antara ekonomi pembangunan dan pertumbuhan adalah: bahwa ekonomi pembangunan menganalisis perkembangan ekonomi yang merupakan fungsi dari faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi, sedangkan ekonomi pertumbuhan menganalisis pemerataan ekonomi yang merupakan fungsi dari faktor-faktor ekonomi.

Pembangunan ekonomi menyatakan tidak hanya lebih banyak output tapi juga lebih banyak macam output dari pada yang diproduksi sebelumnya (Kindleberger, dalam Komarudin, 1988:25).

Dari pendapat para ahli di atas dapat dirangkum bahwa istilah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sering dipergunakan secara bergantian namun ada yang membedakannya yaitu dari luasnya kajian, ekonomi pembangunan lebih luas kajiannya karena menyangkut faktor ekonomi dan non ekonomi sedangkan pertumbuhan hanya menganalisis faktor-faktor ekonomi saja. Faktor-faktor ekonomi meliputi (1) sumber daya alam, (2) Sumber daya manusia, (3) Modal dan (4) teknologi. Sedangkan faktor-faktor non ekonomi meliputi (1) falsafah hidup masyarakat/bangsa, (2) kelembagaan-kelembagaan sosial, (3) sistem sosial, (4) budaya, (5) pemerintah, (6) sistim politik, (6) hukum, (7) keamanan (Yuyun Wirasmita, 2006:6).

### **Pembangunan Ekonomi Indonesia**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Pasal 4 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa pembangunan ekonomi diarahkan kepada pemantapan sistem ekonomi nasional untuk mendorong kemajuan bangsa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Strategi pembangunan ekonomi seringkali diterjemahkan secara parsial. Padahal, perekonomian adalah satu kesatuan aktivitas yang harus dilihat secara komprehensif. Ketika salah satu dan hukumnya terdistorsi, maka hukum ekonomi lainnya melakukan tindakan mekanistik yang berakibat distorsi pada bidang dan sektor atau aspek lainnya. Realita tersebut adalah (sumber kutipan:tahun) :

1. Terjadi ketimpangan kepemilikan faktor produksi antara pemilik faktor produksi berskala besar dengan skala kecil.
2. Distorsi pasar juga terjadi akibat regulasi yang tidak menyentuh akar masalah dan lemahnya kekuatan kontrol institusi yang tersebar di masyarakat.
3. Belum terbangunnya pemetaan fungsi ekonomi berbasis sumber daya alam dalam visi pembangunan.
4. Terganggunya fungsi intermediasi bank akibat konsentrasi kredit pada proyek-proyek besar dan tidak menyentuh kebutuhan sektor produksi rakyat.
5. Korupsi, kolusi dan nepotisme dan *red tape* menjadi hambatan perekonomian, sehingga daya saing menurun dan menciptakan faktor produksi tidak

bekerja optimal dan kinerja perekonomian menjadi lemah.

6. Belum terbangunnya sistem perencanaan ekonomi yang komprehensif dan bersifat lintas geografi dan lintas sektoral berlandaskan semangat otonomi daerah.

### **Pendapatan Nasional**

Pendapatan nasional dapat mempunyai arti sempit dan luas. Dalam pengertian sempit pendapatan nasional adalah terjemahan langsung dari "national income:", sedangkan dalam pengertian luas dapat merujuk pada Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP); atau merujuk pada ke Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP); atau Produk Nasional Netto (PNN) atau *Net National Product* (NNP); atau merujuk pada Pendapatan Nasional (PN) atau *National Income* (NI). Keempat konsep penghitungan pendapatan nasional di atas berbeda satu sama lain.

Menurut pendekatan produksi, produk domestik bruto (Yuyun Wirasmita, 2006:8) adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara dinilai dengan tingkat harga tertentu (harga yang berlaku atau harga tahun tertentu) dalam suatu kurun waktu (biasanya satu) tahun. Dalam penghitungan produk domestik bruto perekonomian dikelompokkan dalam 9 (sembilan) sektor yaitu : (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan galian, (3) Industri pengolahan, (4) Listrik, Gas dan Air Bersih, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, hotel dan restoran, (7) Pengangkutan dan komunikasi, (8) Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan, (9) Jasa-jasa. Apabila ingin menghitung produk nasional bruto nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan setiap sektor oleh masyarakat sendiri, maka pembayaran-pembayaran untuk faktor produksi yang dimiliki perusahaan asing harus dikeluarkan dan menambahkan pembayaran-pembayaran faktor produksi kepada masyarakat yang ada di luar negeri.

Pendekatan yang ketiga adalah penghitungan pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan yang diterima masyarakat akan digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa serta untuk ditabung. Dalam pendekatan pengeluaran penghitungan dengan mengelompokkan pengeluaran yang ada dalam seluruh lapisan

masyarakat, yaitu : (1) pengeluaran konsumsi perorangan dan rumah tangga, berupa ; pengeluaran untuk barang-barang tahan lama dan yang tidak tahan lama, (2) pengeluaran konsumsi pemerintah yang terdiri dari : pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, (3) investasi domestik bruto yang pembangunan bangunan-bangunan, infrastruktur, pengadaan peralatan produksi tahan lama dan persediaan barang oleh sektor swasta.

### **Pengertian Bencana.**

Bencana merupakan *interupsi signifikan* terhadap kesinambungan (*going concern*) kegiatan operasi sehari-hari yang bersifat normal dan berkesinambungan bagi suatu entitas, yang berpengaruh kepada anggota dalam entitas, pemasok entitas, pelanggan entitas dan berbagai *Stake - holder* yang lain. Bencana tetap merugikan mungkin tak mengganggu *going concern* atau kontinuitas operasi sehari-hari sering disebut musibah atau kecelakaan.

Menurut Jusmaliani (2008,34) bencana alam secara umum didefinisikan sebagai kejadian yang waktu terjadinya tidak dapat diprediksi dan bersifat sangat merusak. Sedangkan Asian Disaster Preparedness Centre (2006), mendefinisikan bencana : *the serious disruption of the functioning of society, cause widespread human, material or environmental losses, which exceed the ability of the affected communities to cope using the own resources. Disaster occur when the negative effect of the hazard are not well managed.*

Indonesia selain mempunyai sumber daya alam yang unggul, namun di pihak lain secara geologis wilayah Indonesia terletak di atas pertemuan lempeng-lempeng utama kerak bumi dunia yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik dan secara geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang relatif tinggi. Selain perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) telah menimbulkan ketidakpastian dan pergeseran cuaca dan iklim yang berpotensi menimbulkan bencana.

Undang - undang No. 24 tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

### **Bentuk Bencana.**

Dalam penjelasan undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa umumnya semua bencana alam, awalnya adalah gejala alam biasa. Fenomena itu dikatakan sebagai bencana karena merugikan kepentingan bagi umat manusia. Pepatah mengatakan “Untung tak dapat diduga malang tak dapat raih”, memang kebanyakan bencana alam sulit diramalkan. Oleh karenanya, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kemampuannya guna mengetahui dan memahami tingkat potensi bencana, bentuk dan besar kekuatan bencana yang mungkin menimpa. Berdasarkan Undang-undang 24 tahun 2004 tentang penanggulangan bencana terdapat macam-macam bentuk diantaranya :

1. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan gejala alam, berupa sentakan alamiah yang terjadi di bumi, yang bersumber di dalam bumi dan merambat ke permukaan.
2. Tsunami. Gelombang pasang yang umumnya menerjang pantai landai. Asal-usul kejadiannya dapat dihubungkan dengan adanya tektonik (selanjutnya disebut gempa) dan letusan gunung api.
3. Letusan Gunung api. Letusan Gunung Api adalah suatu lubang bumi, yang dari lubang tersebut dapat dikeluarkan ini bumi berupa padatan panas, cairan panas dan gas panas.
4. Banjir. Banjir, sebenarnya merupakan bencana alam paling dapat diramalkan kedatangannya, karena berhubungan besar curah hujan.
4. Longsor. Longsor merupakan gejala alam untuk mencapai kondisi kestabilan kawasan Seperti halnya banjir, sebenarnya gerakan tanah merupakan bencana alam yang dapat diramalkan kedatangannya, karena berhubungan dengan besar curah hujan.
5. Amblesan. Bencana alam geologi yang kurang disadari dan dianggap penting adalah penyusutan air laut dan amblesan.

### **Penanganan Bencana dan Pembangunan Pasca Bencana.**

Dalam menghadapi bencana alam masa depan, dapat dimulai dengan pemberian informasi potensi bencana alam yang tepat, akurat dari seluruh aparat dan disiplin ilmu terkait. Diharapkan dengan demikian dapat dilakukan pemilihan dan pelaksanaan langkah yang tepat, yaitu : menanggapi bencana, melawan bencana, atau menghindari bencana tersebut. Pemilihan dan penyiapan langkah tersebut dapat didekatkan ke berbagai cara, misalnya ke pola keruangan kawasan pemukiman, pola transportasi, pola informasi, dan lainnya.

Kerusakan yang belum sepenuhnya selesai dibenahi, berikutnya terjadi lagi bencana yang mendatangkan kerugian yang kadang – kadang lebih besar dari kerugian sebelumnya. Analisis resiko bencana diharapkan dapat dipertimbangkan untuk diterapkan dalam pemecahan masalah ini.

Mitigasi bencana alam akan berjalan baik jika masyarakat mengerti dan sadar akan posisinya; di kawasan terlarang, kawasan bahaya I, atau kawasan bahaya II. Kesadaran ini memungkinkan terjadinya perbedaan perilaku masyarakat pada masing-masing kawasan dalam menanggapi bencana alam tersebut. Masyarakat yang berada di kawasan yang memiliki resiko lebih tinggi, tentunya harus lebih tanggap akan kemunculan bencana.

Perihal tanda-tanda bencana “resmi”, tidak disangsikan lagi. Peralatan-peralatan monitoring untuk prakiraan bencana alam makin hari semakin canggih. Namun, kita ketahui bahwa selang waktu antara munculnya “tanda bencana” dan “peristiwa bencana” tidak pasti. Selang waktu dapat berhari-hari, berjam-jam, atau hanya beberapa saat saja. Oleh karenanya kecanggihannya alat-alat tersebut perlu didukung kemandirian sistem informasi. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai menjadikan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan mobilisasi pengungsian menjadi rendah.

Kenyataan menunjukkan, sebagian besar kawasan yang rawan bencana gunung api tidak memiliki jaringan infrastruktur yang memadai; kecuali jika kawasan tersebut merupakan kawasan pengembangan wisata. Kondisi kesadaran dan kemampuan masyarakat yang tinggi dalam manajemen bencana dan tindakan mitigasi bencana alam memungkinkan dilakukan mitigasi secara swadaya. Operasional mitigasi bencana sangat kental dengan nuansa

strukturalnya. Kebenaran langkah yang dipilih harus sesuai dengan kekakuan aturan-aturan struktural. Sebagai contoh, tidak berkembangnya model mitigasi dengan menggunakan bangunan pelindung (*bunker*) adalah contoh penerapan kekakuan itu. Karena penguasa tidak merestui (sama dengan melarang) maka bunker tidak pernah ada. Bahkan kalau ada melanggar hukum. Keswadayaan mitigasi jelas bertumpu pada masyarakat. Karenanya langkah awal yang perlu dilakukan adalah penguatan kesadaran dan kemampuan masyarakat. Untuk mendukung kegiatan ini, tentunya peran “masyarakat luar” masih dimungkinkan dan diperlukan. Sesuai dengan kemampuannya, lembaga lembaga kemasyarakatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dapat mencari peluang untuk ikut berperan.

Dalam mensosialisasikan dan mengembangkan program tersebut, nampaknya terdapat porsi peran untuk LSM-LSM *developmentalist*. Kemampuan LSM-KSM dalam menggigit masyarakat sudah tidak perlu diragukan lagi. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat dalam menanggapi dan kiprah LSM-KSM, namun dipastikan, kiprah LSM-KSM yang praktis dan mengena “langsung” lebih dapat diterima secara jujur oleh masyarakat. Karenanya LSM-KSM cukup berpeluang dalam melakukan penyadaran dan penguatan masyarakat dalam mitigasi bencana alam sehingga keswadayaan itu terwujud.

Program penguasaan manajemen bencana dan mitigasi ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan asas kerakyatan dan kejujuran. Perlu dihindari kecurigaan dan prasangka buruk yang kurang beralasan. Kelaziman yang ada. LSM-KSM berprasangka buruk bahwa pemerintah cenderung membelit dan mempersulit ijin melaksanakan kegiatan. Atau, pemerintah curiga bahwa pasti LSM-KSM mempunyai “udang dibalik batu” untuk menghasut rakyat, jika melakukan kegiatan di suatu kawasan. Dengan didukung dan berkoordinasi dengan instansi terkait, LSM-KSM dapat berperan dalam penguatan masyarakat dalam pengelolaan mitigasi bencana alam seperti : pengelolaan pencarian korban, pengelolaan proses evakuasi, pengelolaan proses pengungsian, pengelolaan barak pengungsian, pengelolaan dapur umum, pengelolaan dana bantuan untuk pengungsi, dan lainnya. Jika hal-hal tersebut telah berjalan baik,

maka akan terhindari adanya peristiwa dan munculnya suara-suara sumbang seperti : bantuan menumpuk dan tak tersalur, dana bantuan raib tidak sampai pada pengungsi, dana bantuan dialokasikan untuk kegiatan tidak jelas, panitia barak pengungsian untung, penyaluran dana tidak adil, dan sebagainya. Dengan demikian yang terpenting adalah hanya sedikit korban langsung maupun tidak langsung dari bencana tersebut.

Dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menurut Davis (2002:48) perlu memperhatikan beberapa hal berikut :

- 1) Untuk menjawab kebutuhan setempat, bahwa setiap pemulihan pascabencana yang dikembangkan harus didasarkan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat yang terkena dampak bencana.
- 2) Pengalokasian sumber daya yang ada. Dalam situasi pasca bencana sumber daya merupakan suatu yang sangat berharga oleh karena itu diperlukan perencanaan yang baik agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Alokasi sumber yang kurang tepat akan menimbulkan persoalan karena dapat menyebabkan berkurangnya sumber daya bagi proyek bantuan dan rehabilitasi pasca bencana lainnya.
- 3) Memahami dinamika situasi. Pemahaman keadaan politik, ekonomi dan sosial daerah terkena dampak sangat diperlukan agar bantuan yang akan diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan di lapangan,
- 4) Penekanan Jangka pendek. Sedangkan dalam situasi pasca bencana tujuan proyek berfokus ke tujuan yang sangat spesifik.
- 5) Kapasitas versus ketergantungan. Program rehabilitasi dan rekonstruksi ke daerah bencana dengan pemberian bantuan dana maupun keahlian yang diperlukan bagi tahap bantuan darurat akan tetapi begtu tanggap darurat selesai maka selesai juga bantuan keahlian atau dana tersebut.
- 6) Akuntabilitas. Akuntabilitas mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan suatu proyek di daerah bencana. Tidak adanya akuntabilitas dapat menimbulkan kegagalan proyek dalam menjawab kebutuhan masyarakat setempat.

- 7) Penilaian, Kualitas, Evaluasi dapat membantu mencegah masalah pragmatis dan mengembalikan kedaerah yang lebih baik. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melibatkan berbagai pelaku, donatur dan korban yang mendapatkan manfaat, sehingga diperlukan suatu komunikasi di antara berbagai pihak pemangku kepentingan.

Korban bencana dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang rumahnya hancur atau rusak dapat diberikan : 1) Tinggal bersama teman atau saudara, 2) Pindah ke rumah yang tidak rusak atau disewakan perumahan, dan 3) Tinggal di tempat penampungan sementara. Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban bencana perlu mendapatkan prioritas utama, karena dapat meningkatkan kepercayaan diri yang mempunyai peran penting dalam pembangunan manusia pada masa rehabilitasi pasca bencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat. Rehabilitasi rumah didasarkan atas pemahaman bahwa rumah merupakan ciri kepribadian, sehingga perlu mempertimbangkan kearifan lokal.

Sparrow dalam Palling (2006,54) menyatakan bahwa strategi pembangunan dalam jangka panjang harus memasukan bencana sebagai bagian dalam perencanaan pembangunan. Untuk periode tanggap darurat memberikan penekanan bantuan kepada masyarakat yang marginal dan rentan. Pada daerah yang proses pembangunannya lamban ternyata proses pemulihannya juga lambat, bahkan kadang kala tidak bisa pulih sama sekali. Penundaan proses rekonstruksi pasca bencana akan mengurangi tingkat Investasi publik maupun swasta karena investasi akan mengalihkan berbagai sumberdaya dan aktivitas pembangunan yang sangat diperlukan untuk melanjutkan rehabilitasi dalam Jangka panjang. Bagi sektor pertanian dan pembenihan, peternakan dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk menggantikan modal produktif sehingga mungkin mengakibatkan migrasi dari daerah beracana.

Mengingat kejadian bencana sulit untuk diprediksi dan korban serta dampaknya sangat luas, maka dalam menghadapi kejadian bencana diperlukan berbagai kerjasama dengan negara lain. Kejadian bencana dengan skala yang besar membutuhkan respon segera yang membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam jumlah

yang banyak, peralatan pendukung, dana yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat.

### **Teori tentang Regulasi.**

Berdasarkan laporan dari global *competitive reporting* 2007, tentang investasi, menyatakan bahwa salah satu faktor hambatan dalam berinvestasi di Indonesia, diantaranya:

- 1) Tidak adanya kepastian hukum akibat tidak jelasnya aturan
- 2) Banyaknya peraturan perundangan-perundangan yang bermasalah, dimana satu sama lainnya saling tumpang tindih
- 3) Tidak konsekuen dan konsistennya dalam pelaksanaan kebijakan dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang ada
- 4) Banyaknya peraturan yang berimplikasi pada konsekuensi finansial (*High Cost*)
- 5) Kesulitan dalam memahami aturan aturan yang ada, dll.

Untuk mengatasi berbagai persoalan regulasi/peraturan, maka pentingnya insentif regulasi yang memberikan kemudahan dan dorongan agar para pengusaha dapat berkembang, khususnya pengusaha di tingkat daerah.

Berbagai fenomena di lapangan memperlihatkan banyaknya peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk pelaksanaan investasi dan pembangunan ekonomi satu sama lainnya saling berlawanan, bahkan kontra produktif. Terlebih-lebih pada era otonomi daerah, banyak peraturan yang ditetapkan pusat tidak berlaku di tingkat daerah, dikarenakan masing-masing daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersendiri.

Regulasi merupakan suatu landasan normatif yang mutlak mesti ada dalam melaksanakan aktivitas suatu organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Namun demikian dalam organisasi modern sekarang ini bahwa pencapaian tujuan bukan hanya bagi kepentingan organisasi internal saja, melainkan tercapainya kepentingan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan organisasi.

Regulasi bukan semata-mata persoalan teknis yang dapat diselesaikan secara teknokratis oleh kelompok orang yang dipercaya untuk merumuskan itu (biasanya politisi, birokrat, atau akademisi). Regulasi dan Kebijakan merupakan ruang bagi teknisi dan

anggota masyarakat untuk melakukan interaksi dan menggabungkan pengetahuan. Karena itu kebijakan harus melibatkan pihak yang luas, dan agar dapat terlaksana harus menjamin agar kepentingan berbagai pihak (*stakeholders*) sudah dikonfrontasi atau dinegosiasikan. Dalam perspektif ini partisipasi tidak dipandang sebagai cara melainkan tujuan itu sendiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa regulasi adalah suatu ketetapan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan penanganan bencana dan pembangunan daerah. Adapun dimensinya terdiri dari 1). Penyusunan Regulasi; 2). Sosialisasi dan pemahaman regulasi; 3). Implementasi dan Evaluasi Regulasi.

### **Teori Tentang Alokasi Anggaran.**

Berbagai sumber-sumber modal/kapital yang dapat digunakan dalam pembangunan, dapat dibedakan menjadi 2 sumber yaitu (1) pengerahan modal dalam negeri dan (2) pengerahan modal luar negeri. Modal yang berasal dan dalam negeri diperoleh dari: Tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah, dan tabungan paksa. Pendapat lain menambahkan dua unsur lagi bagi sumber modal yang berasal dari dalam negeri yaitu pinjaman pemerintah yang berasal dari dalam negeri, dan inflasi (*invisible tax*), dan satu sumber lagi untuk sumber modal luar negeri yaitu pinjaman luar negeri. (Suparmoko,1998:102).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber modal yang tersedia untuk pembangunan dapat diperoleh dari tiga sumber yang di klasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Sumber anggaran / modal dari Pemodal Swasta dalam negeri
- 2) Sumber anggaran / modal dan Pemodal Swasta / pemerintahi luar Negeri
- 3) Sumber anggaran/modal dari pemerintah, melalui tabungan pemerintah,pajak dan investasi.

Disamping faktor kelembagaan, faktor SDM, maka faktor finansial (Besaran alokasi anggaran), merupakan faktor utama dalam pencapaian keberhasilan pembangunan suatu negara atau pengelolaan kelembagaan/perusahaan / koperasi. Terlebih lebih pada kondisi pasca gempa, dimana infrastruktur rusak berat, keberdayaan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan

materiil bahkan dalam keondisi yang tromatik, dan depresi, maka finansial menjadi sangat penting sekali. Dana untuk penanganan bencana, baik untuk rekonstruksi, bantuan pada masyarakat dan dunia usaha harus diperoleh dari berbagai sumber (APBN, APBD Provinsi, Kota, dan kabupaten).

Menurut hasil penelitian Nouri dan Parker (1998) dalam penelitiannya telah menunjukkan hasil hubungan yang positif antara dimensi anggaran (Alokasi anggaran), komitmen organisasi dan kinerja organisasi. Dengan demikian jelas bahwa alokasi anggaran menjadi faktor penentu pelaksanaan pembangunan pasca bencana gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas, alokasi anggaran dapat diartikan sebagai besaran alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, dan dana dari pihak lain yang di alokasikan atau dianggarkan untuk penanganan bencana di Sumatera Barat, dengan dimensi yang digunakan sebagai ukuran dalam penelitian ini terdiri atas 1). Alokasi Anggaran Pusat, 2). Alokasi Anggaran Daerah 3). Alokasi Dana Sumbangan-sumbangan.

### **Teori tentang Investasi.**

Menurut Mudrajat Kuncoro dan (2002:76) menyatakan bahwa yang dimaksud investasi adalah penggunaan dana yang ditanamkan pada aktiva lancar atau modal kerja maupun aktiva tetap yang berupa tanah, mesin, peralatan dan kendaraan bermotor, seperti terlihat dalam neraca disisi sebelah kiri, sedangkan sisi sebelah kanan merupakan sumber-sumber dana yang diinvestasikan.

Rostow dalam Todaro (2000:65) mengatakan bahwa setiap upaya untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilisasi tabungan dalam negeri dan luar negeri, sehingga akan tercipta investasi yang cukup untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, ini berarti akan meningkatkan produksi nasional sehingga akan dapat memenuhi permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pendekatan investasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1). teori usaha perlahan-lahan dan 2). teori Dorongan besar (*big push*). Menurut teori perlahan-lahan, bahwa negara yang terbelakang sebaiknya jangan mengadakan industrialisasi cepat-cepat, sebab resiko dan kekeliruan-kekeliruan akan terlalu besar untuk

dipikul oleh negara miskin. Injeksi kapital yang terlalu banyak adalah kurang baik sampai perekonomian disitu mampu menyerapnya. Sedang menurut teori Dorongan besar (*big push*) mengatakan bahwa bila hanya ada sedikit-sedikit usaha untuk menaikkan pendapatan, hal ini hanya mendorong pertumbuhan penduduk saja, oleh karena itu usaha harus dilaksanakan secara besar-besaran untuk mengatasi perubahan-perubahan penduduk Implikasinya ialah harus diadakan investasi besar-besaran untuk menghilangkan kemiskinan, memaksimalkan output konsumsi sebaiknya ditekan, dan sehingga investasi terus ada.

Dengan demikian jelas pentingnya Investasi dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi, karena dengan investasi akan memberikan dampak multiplier efek, namun yang membedakan adalah besar kecilnya investasi dalam proses pembangunan. Oleh karena itu bagaimana mencari sumber modal untuk melakukan investasi. Terdapat sumber-sumber modal/kapital yang dapat digunakan dalam pembangunan, dapat dibedakan menjadi 2 sumber yaitu (1) pengerahan modal dalam negeri dan (2) pengerahan modal luar negeri. Modal yang berasal dan dalam negeri diperoleh dari: Tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah, dan tabungan paksa. Sedangkan modal yang berasal dari luar negeri dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu Bantuan luar negeri dan penanaman modal asing. (Sadono Sukirno, 1998,149.) Pendapat lain menambahkan dua unsur lagi bagi sumber modal yang berasal dari dalam negeri yaitu pinjaman pemerintah yang berasal dari dalam negeri, dan inflasi (*invisible tax*), dan satu sumber lagi untuk sumber modal luar negeri yaitu pinjaman luar negeri. (Suparmoko,1998).

Adapun sumber modal yang tersedia untuk pembangunan dapat diperoleh dari tiga sumber yang diklasifikasikan sebagai berikut : 1). Sumber modal dari Pemodal Swasta dalam negeri, 2). Sumber modal dan Pemodal Swasta/pemerintahi luar negeri, 3). Sumber modal dari pemerintah, melalui tabungan pemerintah,pajak dan investasi.

Penanaman modal adalah untuk memperoleh keuntungan, dengan anggapan setiap pengusaha bertindak Secara rasionil, pengusaha akan selalu memilih proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan yang maksimum. (Sadono Sukirno, 1998:150). Pendapat lain

mengemukakan bahwa tujuan berinvestasi adalah untuk memaksimalkan nilai saham (nilai pasar modal sendiri), Atasannya yang mendukung adalah bahwa pemilik modal sendiri adalah perusahaan, dan perusahaan seharusnya berusaha meningkatkan kemakmuran mereka. Nilai saham adalah ukuran yang tepat untuk menilai kemakmuran mereka (Suad Human, 2000:65).

Sektor yang sangat signifikan dalam percepatan pembangunan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja adalah sektor industri dan jasa transportasi. Dengan demikian Industrialisasi jasa transportasi merupakan salah satu proses kunci dalam perubahan struktur perekonomian di mana terjadi proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi produksi dan perdagangan antar negara yang sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Industrialisasi jasa transportasi bukan merupakan tujuan akhir dari pembangunan melainkan strategi yang mendukung proses pelaksanaan pembangunan.

Strategi pembangunan ekonomi yang diimplementasikan pada saat ini tidak cukup mampu menstimulasi sektor industri, sektor pertanian, sektor transportasi dan sektor jasa.

Dalam penelitian kaitannya dengan investasi diartikan sebagai besaran investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dalam dan luar negeri, serta masyarakat yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan pasca bencana, dengan dimensinya yaitu 1). Perijinan investasi, 2).Ketersediaan Infrastruktur, 3). Jaminan keamanan, 4). Ketersediaan Kualitas sumber Daya

### **Teori Tentang Tata Kelola Pemerintah Daerah.**

Kemampuan suatu lembaga pemerintahan direpresentasikan oleh kinerja lembaga yang tinggi, namun demikian kinerja tersebut akan dicapai, apabila tata kelola kelembagaan yang baik (*Good Governance*). Kinerja bersifat multi dimensional, begitu juga tata kelola bersifat multi dimensional pula. Oleh karena itu pengukuran kinerja dan tata kelola menggunakan dimensi pengukuran tunggal tidak mampu memberikan pemahaman, maka pengukuran kinerja hendaknya menggunakan atau mengintegrasikan dimensi pengukuran yang beragam (Wiklund,1999: 312).

Pelaksanaan tatakelola merupakan tindak lanjut dari perencanaan strategik, dalam artian tata kelola merupakan bagian dari pelaksanaan strategi kelembagaan dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan aktivitas kelembagaan itu sendiri. Suatu lembaga dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau Ukuran pencapaian yang mengarah kepada pencapaian misi, tujuan serta tujuan/ sasaran lembaga.

Tampubolon - Siagian (2001:35), mengutarakan bahwa indikator tatakelola yang baik diantaranya :

- 1) Relevansi, yakni kesesuaian dengan kebutuhan pegawai.
- 2) Efisiensi, yakni kehematan dalam penggunaan sumber daya (dana, tenaga, waktu, dan lain-lain) untuk berproduksi dan menyajikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan konsumen.
- 3) Efektivitas, yakni kesesuaian perencanaan dengan hasil yang dicapai, atau ketepatan sistem, metode, dan atau proses yang dipergunakan untuk menghasilkan jasa yang direncanakan.
- 4) Akuntabilitas (kebertanggungjawaban), yakni dapat tidaknya jasa dan kinerja, dan perilaku para pengelola, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, etika akademik, agama, dan nilai budaya.
- 5) Kreativitas, yakni kemampuan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam aktivitasnya.
- 6) Suasana kerja. Secara sederhana, yang dimaksud dengan suasana kerja adalah: derajat kepuasan dan motivasi yang meliputi pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban untuk mencapai tujuan lembaga.

Upaya perubahan-perubahan dan kemampuan inovasi, serta suasana kerja, yang dapat dirinci sebagai berikut (Tampubolon dan Siagian (2001:36) :

- 1) Efisiensi : Dimana Efisiensi merupakan keterkaitan antara masukan sumber daya dengan proses, serta menunjukkan derajat kehematan dalam penggunaan sumber daya dalam proses.
- 2) Produktivitas : Dimana Produktivitas merupakan keterkaitan antara proses dengan keluaran (dalam hal ini hasil), dan menunjukkan jumlah suatu hasil yang terjadi karena suatu proses tertentu, dihitung

berdasarkan penggunaan sumber daya tertentu.

- 3) Efektivitas: Dimana Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dengan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara 'tujuan yang dinyatakan' dengan hasil yang dicapai.
- 4) Akuntabilitas: Dimana akuntabilitas adalah derajat pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi dari perusahaan.
- 5) Kemampuan Inovasi: Dimana kemampuan inovasi adalah derajat kelenturan perusahaan atau program programnya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. inovasi, pembaharuan, atau menciptakan sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk kemampuan evaluasi.
- 6) Situasi Menyenangkan dan Memotivasi (M-M), yakni suasana yang menyeringkan dan memotivasi dalam lembaga sehingga semua orang melaksanakan tugasnya dengan senang hati, tulus dan penuh semangat.
- 7) Penampilan (tangibility): Dimana penampilan yakni kerapihan, kebersihan, keindahan dan keharmonisan sarana dan prasarana lembaga, yang membuat situasi dan pelayanan semakin menarik.
- 8) Empati : Dimana empati yakni kemampuan lembaga, khususnya para pengelola, dalam memperhatikan dan memberikan respon terhadap keadaan serta kebutuhan pegawai dan konsumen dengan cepat dan tepat.
- 9) Ketanggapan: Dimana ketanggapan yakni kemampuan lembaga, khususnya para pengelola dalam memperhatikan dan memberikan respon terhadap keadaan serta kebutuhan dengan cepat dan tepat.

### **Teori Tentang Peranan Dunia Usaha.**

Konsep yang luas mengenai partisipasi dari kalangan dunia usaha yang mempunyai kemampuan lebih (kemampuan finansial dan kemampuan teknis), maka seharusnya menempatkan partisipasi dari dunia usaha sebagai bagian intern dalam tata pemerintahan (*governance*) dan kebijakan publik. Namun demikian, hal ini masih belum dilaksanakan secara optimal di Sumatera Barat. Ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu: masalah wawasan, kerangka hukum, kelembagaan pemerintahan, dan peranan organisasi profesi/ pengusaha agar

partisipasi menjadi bagian yang inherent dalam pembangunan daerah secara menyeluruh.

Peningkatan peranan partisipasi swasta atau dunia usaha, merupakan potensi yang sangat besar dalam menunjang pembangunan, terutama pada saat terjadinya bencana, dengan demikian perlu dilakukan upaya penyempurnaan disegala bidang sebagai bagian dari proses restrukturisasi yang mendalam. Keterbatasan pemerintah dapat dibantu oleh peranan dunia usaha yang ada di daerah sehingga terjadi akumulasi potensi dalam menangani bencana. Disamping itu, partisipasi Dunia Usaha, merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dari perusahaan terhadap negara dan masyarakat (*Corporate Social Responsibility*).

Dalam hal ini keterlibatan dari pihak dunia usaha yang membantu pemerintah dalam penanganan bencana, baik dalam membangun kembali sarana dan prasarana yang berkaitan aktivitas usahanya, maupun lingkungan sekitarnya, dengan dimensinya yaitu 1). Pemahaman terhadap masalah bencana, 2). Kemampuan terhadap penanganan bencana, 3). Keikutsertaan dalam membantu Pemda dan pihak lainnya

### **Teori Tentang Peranan Masyarakat.**

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang di desentralisasikan, antara lain kerangka politik, aspek fiskal, transparansi (keterbukaan) kegiatan pemerintah, partisipasi masyarakat, efektivitas masyarakat madani, aspek struktur sosial, dan kapasitas pemerintah daerah (Omar Azfar, 1999).

Faktor keterlibatan dari pihak masyarakat yang memberikan bantuan pemerintah dalam penanganan bencana, baik dalam membangun kembali rumah maupun lingkungan sekitarnya. Adapun dimensinya terdiri dari : 1). Kemampuan terhadap penanganan bencana 2). Keikutsertaan dalam membantu pihak lainnya

### **Teori Tentang Pertumbuhan Ekonomi Pasca Bencana.**

UNDP (1994), telah menjelaskan model pembangunan pasca bencana yang terdiri dari 4 (empat) model, yaitu :

- a. Bencana telah menimbulkan kemunduran pembangunan karena hancurnya inisiatif untuk membangun.

- b. Pembangunan dapat meningkatkan kerawanan dan kerentanan dalam menghadapi bencana.
- c. Pembangunan dapat menurunkan kerawanan dan kerentanan dalam menghadapi bencana dan dampak negatif yang ditimbulkannya.
- d. Bencana memberikan kesempatan yang luas untuk memulai dan meningkatkan pembangunan.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat menurunkan tingkat kerentanan penduduk yang ada. Berdasarkan hasil penelitian Told and Leek (1993:107) dan Burton (1993:99) menunjukkan korelasi potensi antara jumlah penduduk yang rentan terkena dampak bencana dengan peningkatan pendapatan. Tarap hidup yang meningkat akan membantu penduduk untuk memperbaiki kehidupan ke arah yang lebih baik. Penduduk yang rentan terhadap dampak bencana akan berkurang sejalan dengan peningkatan pendapatan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi. Sejalan dengan penelitian Burton dalam Rassmussen (2004:28) menunjukkan adanya hubungan antara korban bencana dengan tingkat pendapatan. Korban dalam masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana adalah penduduk dengan kondisi ekonomi dan politik yang lebih rendah. Dalam penelitian lain yang dilaksanakan oleh Kahn dalam Rassmussen (2004,33) menunjukkan korelasi negatif antara rendahnya jumlah penduduk yang meninggal dan kehilangan rumah yang dikaitkan dengan tingkat pendapatan masyarakat yang semakin meningkat.

Dalam melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan upaya untuk memulihkan kehidupan dan lingkungan pada keadaan sebelum bencana dan bila keadaan memungkinkan dilakukan rekonstruksi ke tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik. Sektor yang biasa terkena dampak bencana antara lain : bangunan, infrastruktur, asset ekonomis, administrasi dan layanan publik, psikologis, budaya, sosial ketertiban keamanan dan lingkungan hidup. Sebagai upaya merehabilitasi dan merekonstruksi pasca bencana, adalah menilai dampak bencana terutama jenis kerusakan yang terjadi, menilai pelaku yang akan melaksanakan program pemulihan, pemetaan wilayah yang mengalami dampak bencana, menyusun prioritas kebutuhan yang harus segera dipulihkan.

Dalam melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana perlu adanya organisasi pelaksana yang efektif. Model organisasi harus disesuaikan dengan kondisi negara yang bersangkutan dan dampak bencana yang ditimbulkan. Model organisasi dapat menangani pemulihan pasca bencana, yaitu :

- 1) Model organisasi dengan struktur yang ada dalam model ini pengelolaan pemulihan pasca bencana dengan memanfaatkan struktur yang ada dalam pemerintahan. Model ini menggunakan jalur kementerian atau lembaga pemerintah tanpa banyak membuat perubahan organisasional.
- 2) Model pembentukan komite atau gugus tugas pemulihan pasca bencana yang baru. Dalam model ini pemerintah membentuk komisi atau gugus tugas *ad hoc* dengan anggota diambil dari berbagai Kementerian atau Lembaga untuk mengelola proses pemulihan pasca bencana.
- 3) Model dengan membentuk organisasi pemulihan pasca bencana yang baru.
- 4) Pembentukan organisasi pemulihan pasca bencana yang berubah menjadi lembaga permanen.

Berbicara tentang pembangunan ekonomi pasca bencana tiada lain adalah upaya yang dilakukan mulai dari penanggulangan bencana sampai dengan rekonstruksi pasca bencana. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 tentang penanggulangan bencana disebutkan bahwa rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan usaha, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Pada akhir masa rekonstruksi di bidang ekonomi korban bencana, maka pendapatan korban bencana menjadi lebih meningkat dari keadaan sebelum bencana. Kegiatan rekonstruksi adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana umum.
- 2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
- 3) Pembangkitan kembali kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

- 4) Penerapan rancang bangun yang tetap dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.
- 5) Partisipasi dan peran serta lembaga yang tepat dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
- 6) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
- 7) Peningkatan fungsi pelayanan publik, atau
- 8) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Kegiatan rekonstruksi merupakan upaya urituk meningkatkan taraf ekonomi korban bencana ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan keadaan setelah pemulihan ekonomi pascabencana.

Sesuai uraian di atas, tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari adanya aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dari suatu daerah, khususnya daerah bencana, dengan dimensinya adalah : pembangunan bidang kesehatan; pembangunan bidang pendidikan; pembangunan Infrastruktur; pembangunan bidang ekonomi.

### **Teori Lapangan Pekerjaan.**

Lapangan pekerjaan erat kaitannya dengan pengangguran. Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada umumnya pengangguran dikarenakan jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya.

Pengangguran menjadi salah satu masalah perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Lapangan pekerjaan diperlukan sebagai wahana sumber daya manusia yang berkarya, bekerja dan mengembangkan keterampilan mereka agar lebih unggul untuk menciptakan dan meningkatkan daya saing (A. Makmur Makka 2008:441).

Penyediaan lapangan kerja yang tinggi merupakan tujuan bernilai karena dua alasan utama yaitu 1) situasi alternatif-pengangguran tinggi – menyebabkan kesengsaraan manusia;

dan 2) ketika pengangguran tinggi, perekonomian mempunyai pekerja menganggur atau sumber daya menganggur akan menghasilkan kerugian (Mishkin, 2009:59).

Boediono (2009:56) dalam bukunya mengatakan konsepsi pengangguran model teori ekonomi liberal klasik mengatakan bahwa sumber utama lapangan pekerjaan adalah sektor swasta dengan modus operasinya adalah mekanisme pasar. Mereka yang tidak memperoleh pekerjaan dalam sistem ini dianggap sebagai “pengangguran sukarela”, yang menurut definisi bukan merupakan suatu masalah yang perlu diatasi. Keynes (dalam Boediono, 2009:56) mengatakan bahwa negara berkewajiban mempertahankan tingkat permintaan agregat masyarakat agar sektor swasta bisa menyediakan lapangan kerja yang cukup.

Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan secara umum memberikan sumbangan yang sangat positif terhadap berjalannya pasar kerja di Indonesia. Undang-undang yang baru ini memperlihatkan konsensus dari berbagai pihak terkait mengenai isu-isu yang sebelumnya sangat menimbulkan pertentangan.

Undang-undang yang baru ini juga sejalan dengan berbagai konvensi ILO yang telah diratifikasi. Hal mendasar yang dicantumkan dalam Undang-undang tersebut adalah ditetapkannya aturan main mengenai representasi pekerja dalam bidang ketenaga kerjaan dan upaya rangka proses perundingan kolektif.

Salah satu yang menarik dari perkembangan terakhir kondisi ekonomi Indonesia adalah walaupun stabilitas makro ekonomi telah tercapai, namun investasi sektor riil belum bergerak. Data pertumbuhan ekonomi yang berkisar rata-rata 4,0% dalam waktu empat tahun terakhir lebih banyak mengandalkan kekuatan konsumsi dibandingkan investasi. Belum ada tanda-tanda sektor ekonomi potensial padat pekerja bergerak maju. Kondisi ini sangat beralasan untuk mengusulkan agar perbaikan iklim usaha diperbaiki agar dapat menarik investasi domestik dan asing.

Dalam mengaitkan investasi dan ketenagakerjaan, kita perlu belajar dari negara Cina yang terkenal dengan pengangguran yang besar di masa lalu yang telah mampu menciptakan lapangan kerja dengan sistem jaminan sosial yang memadai. Perluasan

lapangan kerja dengan kebijakan nasional melalui jembatan investasi dan pengembangan sumberdaya manusia terus-menerus dikembangkan.

Dalam seminar dan lokakarya yang diselenggarakan oleh ISEI Pusat, Depnakertrans, Bappenas dan ILO. Menyatakan potensi dan peranan usaha kecil menengah (UKM) dalam menciptakan lapangan kerja di masa depan sangat besar. Permasalahannya bagaimana dalam pemulihan ekonomi agar pemerintah memiliki agenda dalam mengatasi pengangguran yang kian membesar. Langkah yang paling strategis bagi pemerintah nasional dan lokal bergiat mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru sehingga tercipta kesempatan kerja yang lebih tinggi dan merata. Adapun rekomendasi kebijakan untuk menciptakan kesempatan kerja, sebagai berikut (diolah dari ISEI, 2004) :

- 1) Dalam usaha menciptakan lapangan kerja, pemerintah secara aktif menyusun kebijakan makro yang bertujuan mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pada masa lalu, pertumbuhan ekonomi bersumber pada upah murah (mobilisasi buruh) dan sumberdaya alam.
- 2) Dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan makro, perlu diikutsertakan ahli-ahli ekonomi ketenagakerjaan yang kompeten. Masalah ketenagakerjaan sebaiknya dimasukkan menjadi bagian dari kebijakan ekonomi makro.
- 3) Dari sisi makro, penciptaan lapangan kerja akan lebih kondusif bila: (a) nilai tukar dan tingkat suku bunga stabil dan kompetitif, dan (b) reformasi bidang keuangan dan perbankan dilanjutkan agar fungsi intermediasi bank dapat mendorong berkembangnya sektor riil.

Menurut Hanafie (2010:75) ada beberapa permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, yaitu 1) meningkatnya jumlah pengangguran; 2) menciutnya lapangan kerja formal di perkotaan dan pedesaan; 3) pekerja bekerja di lapangan kerja yang kurang produktif; 4) perbedaan upah yang semakin lebar antara pekerja formal dan informal; 5) adanya indikasi menurunnya produktivitas di industri pengolahan; dan 6) meningkatnya tingkat pengangguran.

### **Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang peneliti laksanakan.

#### **1. Penelitian Heru Nugroho (2001:49) tentang Bencana Alam.**

Dalam perspektif Sosio-Kultural, menyatakan bahwa : Bencana alam yang melanda wilayah Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kekeringan telah banyak menimbulkan kerugian yang amat besar, baik jiwa, harta benda, dan tertundanya aktivitas kegiatan sosial maupun ekonomi masyarakat. Kejadian bencana tersebut harus menjadi peringatan bagi semua bahwa dalam mengelola alam sekarang ini telah salah arah sehingga perlu merancang suatu upaya pencegahan bencana sedini mungkin dalam upaya meminimalisasi kerugian baik jiwa maupun material. Oleh karena itu dalam penanganan bencana di Indonesia harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pemahaman bencana bencana alam harus dikaitkan dengan eksploitasi lingkungan yang terjadi selama ini,
  - b. Penanggulangan risiko bencana harus dikaitkan dengan kebijakan Publik yang selama ini di tetapkan oleh pemerintah,
  - c. Penanganan bencana harus dikaitkan dengan faktor budaya yang berkembang di masyarakat pada daerah bencana, sehingga seluruh pihak akan menarik manfaat dan belajar dari alam.
2. Lusi Margiyani (2008:13) tentang penanggulangan bencana dalam perspektif Masyarakat (Perempuan dan Anak).

Bencana Gempa Tsunami, banjir dan tanah longsor merupakan bagian dari gejala alam dan bagian dari kehidupan. Namun gejala alam ini dapat menjadi sebuah bencana apabila tidak mempersiapkan langkah-langkah untuk penanggulangan. Dalam lima tahun terakhir ini wacana mengenai bencana dan upaya penanggulangannya mulai menarik perhatian banyak kalangan seperti lembaga-lembaga internasional, LSM. Pemaknaan terhadap bencana yang secara konvensional dianggap sebagai sebuah kejadian yang tidak dapat dicegah, kemudian mengalami pergeseran makna bahwa bencana dapat diduga sebelumnya sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan dan pengurangan resiko. Rentang waktu dan fokus bantuan yang

- awalnya hanya berorientasi pemberian bantuan fisik, teknis semata dan hanya dilakukan saat tanggap darurat bencana, kemudian dengan konsep penanggulangan bencana berbasis masyarakat, kerja penanggulangan bencana dilakukan sejak sebelum bencana terjadi yaitu melalui upaya pencegahan, peredaman resiko dan peringatan dini. Masyarakat yang terkena bencana, yang semula diposisikan sebagai objek yang pasif hanya menunggu dan menerima bantuan saja, kemudian diubah menjadi subyek yang aktif dan dengan kesadaran diri merasa bertanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan bencana. Dengan demikian tujuan penanggulangan bencana tidak hanya sebatas mengurangi penderitaan korban dan pemulihan kondisi masyarakat kembali ke situasi normal, namun lebih jauh lagi tujuan PBBM berupaya mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat. Perempuan dan anak terpinggirkan dalam tatanan masyarakat kita, biasanya diposisikan rendah ataupun tidak pernah diikutkan berpartisipasi aktif dalam proses-proses perencanaan maupun pengambilan keputusan di masyarakat.
3. Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Pengembangan Ekonomi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah, pada Tahun 2008, adapun kesimpulan sebagai berikut : gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 telah merusak prasarana dan sarana produksi di berbagai sektor, sehingga menyebabkan terjadinya koritraksi ekonoml di wilayah gempa, khususnya di Kabupaten Baritul dan Klaten. Untuk memulihkan ekonomi korban bencana telah disusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk pemulihan ekonomi korban bencana. Kepada korban bencana telah diberikan bantuan permodalan, bantuan peralatan usaha dan pendampingan tehnis usaha, sesuai dengan usaha yang pernah menjadi matapencaharian sebelum terjadi bencana. Adapun rekomendasi hasil penelitiannya yaitu : 1) agar segera melaksanakan rehabilitasi Jalan, Jembatan untuk siap menyediakan akses keluar masuk lokasi bencana, penyehamatan aset produktif seperti ternak, tanaman dan irigasi. 2) Penyediaan hunian sementara yang layak. 3) Pembinaan Koperasi dan UMKM pasca bencana membutuhkan bukan hanya dana saja, melainkan pendampingan dan peningkatan sumber daya manusia. 4) Mengintegrasikan program bantuan reguler dengan program dan kemudahan dengan program pemulihan pascabencana secara terpadu. 5) Pemulihan ekonomi korban bencana membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pembangunan fisik dampak bencana. 6) Pelaksanaan program pemulihan ekonomi ditekankan melalui partisipasi dan ide kreatif masyarakat korban bencana agar menjadi mandiri.
  4. Jan Hoesada (2006), *Disaster Recovery Planning: Manajemen Bencana Administrasi Dan Akuntansi*. Dalam bencana pemerintah selalu menghadapi risiko kehilangan data akuntansi karena bencana. Keruntuhan sistem informasi merupakan bencana, menyebabkan terhentinya kegiatan sehari-hari suatu entitas karena kehilangan informasi. Masa lalu tiba-tiba "hilang" lenyap, dan peta jalan masa depan tiba-tiba buram. Pertanggungjawaban menjadi tidak mungkin diberi atau diminta. Tsunami melenyapkan sebagian (besar?) data administrasi signifikan pemerintah daerah Aceh, Nias, dan beberapa daerah lain. Sejak itu pemerintah daerah yang lain mulai memperhitungkan risiko kehilangan data yang dapat melumpuhkan kegiatan operasional pemda. Pada Tsunami Aceh, bukan hanya data, bersama surat tanah bahkan (patok) batas tanah penduduk sebagian telah lenyap. Dengan demikian data peta tanah (pemotretan udara) dibutuhkan untuk membuat batas baru setelah bencana.
  5. Yurnalisman (2010), Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan jasa Konstruksi, dan Implikasinya pada peningkatan kesejahteraan pegawai dan pendapatan asli daerah pada perusahaan jasa kontruksi di Provinsi Sumatra Barat. Menyatakan bahwa regulasi, kualitas SDM, kemampuan modal, teknologi dan informasi, strategi kemitraan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan jasa konstruksi di Sumatra Barat. Begitu juga kinerja manajemen proyek dan kemampuan kinerja keuangan pada perusahaan jasa konstruksi di Sumatra Barat yang pada

akhirnya akan memberikan kesejahteraan pegawai.

6. Burhanudin (2001), Analisis faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi yang mempengaruhi pemulihan ekonomi dan implikasinya terhadap peningkatan keadaan ekonomi korban bencana di daerah pasca bencana di Jogyakarta.

Menyatakan bahwa peningkatan ekonomi pasca bencana lebih dipengaruhi secara signifikan oleh adanya pengaruh langsung dari pemulihan ekonomi, sumber daya manusia, dan kerusakan serta pengaruh tidak langsung dari sumber daya manusia dan kerusakan melalui pemulihan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi kebijakan peningkatan ekonomi pasca bencana baru terbatas antara sumber daya manusia, kerusakan dan pemulihan ekonomi.

### **Kerangka Pemikiran**

Sudah sejak lama dan telah menjadi tradisi bahwa kebijakan makro selalu menekankan pada empat sasaran pokok: (1) pertumbuhan ekonomi diiringi dengan (2) inflasi rendah dan (3) neraca pembayaran yang sehat dan kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, maka (4) penciptaan lapangan kerja diharapkan tercapai. Posisi penciptaan lapangan kerja selalu bersifat implisit dalam pertumbuhan ekonomi. Data dan informasi yang tersedia untuk mengelola pertumbuhan, pengendalian inflasi dan neraca pembayaran relatif tersedia secara rinci dan telah tertata dengan baik. Sebaliknya, data ketenagakerjaan, sampai saat ini masih kurang memadai untuk pembuatan kebijakan ketenagakerjaan secara menyeluruh. Dari sisi ini, kita melihat bahwa penciptaan lapangan kerja tetap masih bersifat *inferior* dalam seluruh wacana kebijakan makro ekonomi. Sedangkan di negara maju, keempat fokus target tersebut diperlakukan sama penting dalam operasi kebijakan makro ekonomi.

Pembangunan ekonomi menurut Todaro (2000:24), mengartikan pembangunan sebagai "*the process of improving the quality of all human lives*". Terdapat tiga aspek komponen penting pembangunan yang dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki antara lain : a). Kecukupan (*sustenance*) b). Jati diri (*self-esteem*) c). Kebebasan (*freedom*). Charles P Todaro dan Kindleberger (1993), lebih

menegaskan lagi bahwa dalam tujuan pembangunan adalah memuat tiga hal yang penting yaitu: Pertumbuhan output yang lebih cepat, Perubahan struktur ekonomi, dan Pengurangan jumlah orang miskin. Pembangunan di bidang transportasi terhadap aspek ekonomi diantaranya adalah : (1) tersedianya barang, (2) stabilisasi dan penyamaan harga (3) penurunan harga (4) meningkatkan nilai tanah (5) tersedianya spesialisasi antarwilayah (6) berkembangnya usaha skala besar dan (7) terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk (Rustian, 2003:24)

Menurut Forkenbrock (1990) Prasyarat pertumbuhan ekonomi suatu negara didukung oleh persayaratan antara lain : pertama, penyediaan fasilitas transportasi yang didasarkan pada premis distribusi yang merata dari fasilitas sosial, dalam beberapa hal, mungkin gagal untuk mencapai tujuan efisiensi investasi. Sampai manfaat totalnya lebih besar dari biaya totalnya, pemerataan dalam perbaikan infrastruktur transportasi mungkin akan menghilangkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah yang tidak terisolasi, yang memiliki kontribusi sumberdaya potensial harus dilakukan dengan hati-hati dengan pertimbangan efisiensi. Tuntutan pembangunan transportasi pada pasca gempa, menjadi suatu kemutlakan, bukan saja untuk kelancaran transportasi, melainkan untuk kepentingan penanganan gawat darurat terhadap penanganan korban bencana, dan distribusi pangan untuk konsumsi bagi masyarakat yang kena bencana.

Keberhasilan pembangunan ekonomi diperlukan dukungan investasi dalam menghasilkan barang dan jasa. Penggunaan kegiatan produksi adalah untuk efisiensi dan mampu menghasilkan barang dan jasa secara massal. Dalam kegiatan operasional memerlukan input pendukung agar dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Meurut Todaro (2000:56) Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional. Pembangunan yang selalu tumbuh membutuhkan investasi yang besar, sehingga mampu memberikan peningkatan kapasitas produksi nasional yang pada akhirnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Keberhasilan pembangunan pasca bencana akan memberikan dampak pada peningkatan riil dalam masyarakat. Peningkatan kapasitas produksi

daerah bencana juga akan memberikan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang lebih besar dalam perekonomian daerah. Kesempatan kerja dan peluang berusaha akan memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan tingkat pengangguran akan mengurangi angka kemiskinan dalam masyarakat yang telah menjadi korban bencana.

Menurut Mangkunegara (2002), Tata kelola yang baik dapat dilihat dari hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Secara umum dapat dikatakan bahwa tatakelola merupakan wujud atau keberhasilan dari berbagai komponen organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian tatakelola dalam penanganan bencana merupakan suatu keharusan bagi : pemerintahan, badan penanggulangan bencana, organisasi kemasyarakatan yang menangani bencana, dan perusahaan yang terlibat dalam rekonstruksi pasca bencana. Dengan demikian tata kelola merupakan sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan sebaik mungkin (*good government governance atau good corporate governance*).

Dalam pemulihan pasca bencana, baik pemulihan psikologis, maupun pemulihan ekonomi diperlukan kelembagaan yang kuat dan mampu melaksanakan tatakelola yang baik, yang mampu membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pasca bencana. Kelembagaan terdiri dari berbagai unsur, meliputi : Unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, unsur dunia usaha, unsur lembaga profesi, dan unsur masyarakat.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan upaya untuk mengembalikan kehidupan dan lingkungan pada keadaan sebelum bencana dan juga diupayakan untuk rekonstruksi ke tingkat kualitas kehidupan yang lebih baik. Pada umumnya yang biasa terkena dampak bencana antara lain : bangunan-bangunan, infrastruktur, asset ekonomis, administrasi dan layanan publik, psikologis, budaya, sosial ketertiban keamanan dan lingkungan hidup. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi : Kesatu, adalah

inventarisasi dan menilai dampak bencana terutama jenis kerusakan yang terjadi, menilai pelaku yang akan melaksanakan program pemulihan,

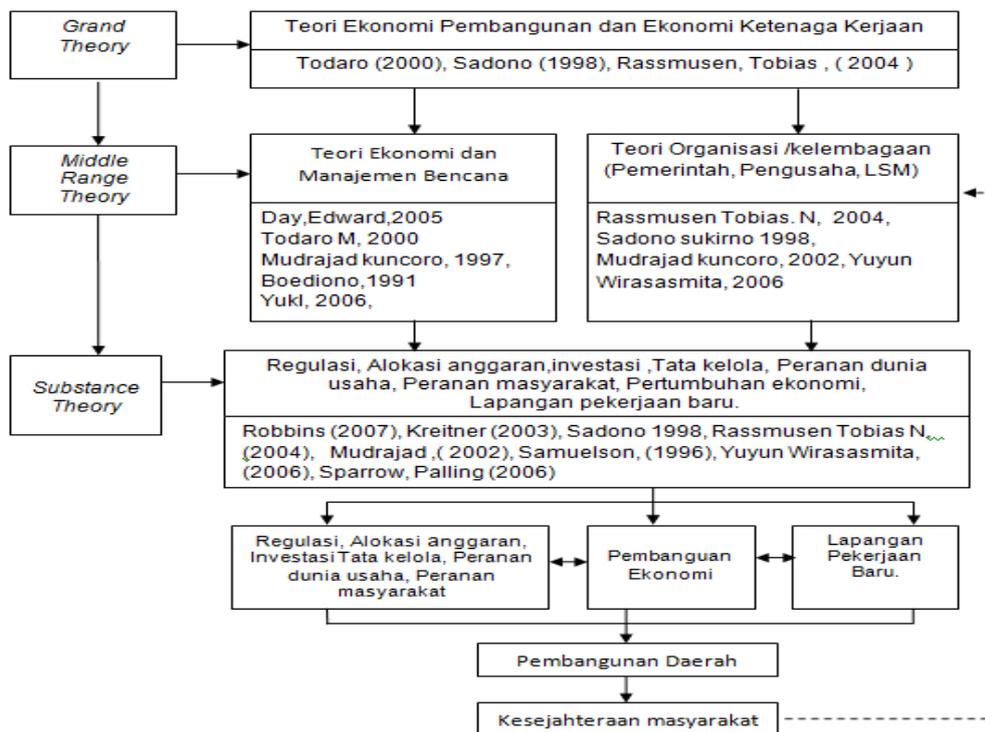
pemetaan wilayah yang mengalami dampak bencana, Kedua, menyusun program prioritas kebutuhan yang harus segera diadakan dan dipulihkan. Ketiga, rencana program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang meliputi antara lain : tujuan secara keseluruhan, tujuan langsung, hasil yang diharapkan, dan peningkatan pelayanan pada publik.

Berdasarkan identifikasi masalah, perumusan masalah serta kerangka dasar teoritis yang dikemukakan sebelumnya, maka variabel regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha diduga memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pasca bencana, dan memberikan implikasi kepada penciptaan lapangan pekerjaan.

Kerangka teori dalam penelitian ini didasarkan pada ilmu ekonomi (membahas; pembangunan ekonomi daerah, investasi, dan lapangan pekerjaan), teori organisasi (membahas kelembagaan daerah). teori manajemen (manajemen keuangan dan tatakelola kelembagaan daerah),

dan teori sosial (peranan masyarakat). Sesuai alur pemikiran di atas, maka pemaparan kerangka pemikiran ini, dapat uraikan sebagai berikut, Pertama (sub struktur I) menjelaskan pengaruh pelaksanaan regulasi, alokasi anggaran, tata kelola Pemda, peranan dunia usaha, peranan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi pasca bencana. Kedua (sub struktur II) menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi pasca bencana terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru.

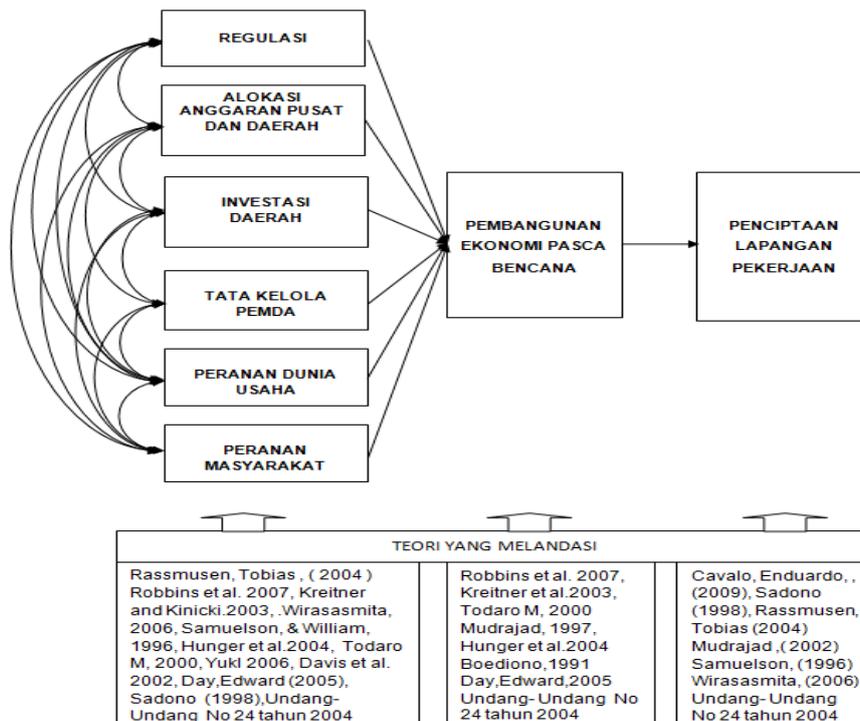
Dari uraian kajian pustaka di atas, secara keseluruhan merinci urutan konseptual dari *grand theory*, teori pembangunan dan teori ekonomi tenaga kerja, dilengkapi dengan *middle theory* yang berkaitan dengan manajemen dan teori organisasi serta *applied theory* mengenai regulasi, alokasi anggaran pusat dan anggaran daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha, dan lapangan pekerjaan. Kajian pustaka yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini seperti terlihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Landasan Teori Keseluruhan**

Keterangan:

- > Alur landasan teori dalam cakupan penelitian
- - - - -> Alur balik melengkapi dan memprakarsai teori



**Gambar 2. Paradigma Penelitian**

### Hipotesis Penelitian

1. Terdapat pengaruh secara simultan yang signifikan dari variabel Regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana.
2. Terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari variabel Regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pembangunan ekonomi pasca bencana terhadap penciptaan lapangan pekerjaan.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama lebih kurang delapan bulan yang meliputi tahap persiapan, pra penelitian, penyusunan sampai dengan bentuk laporan usulan penelitian dan usulan penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di lima kota yang paling parah korban gempa tahun 2009 di Provinsi Sumatera Barat. Adapun rincian kelima kota tersebut terdiri dari; Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam.

### Metode Penelitian

Metode yang Digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif, yaitu

untuk memperoleh deskripsi tentang regulasi, alokasi anggaran pusat dan anggaran daerah, investasi daerah, tatakelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha, pembangunan ekonomi pasca bencana dan implikasinya pada penciptaan lapangan pekerjaan.

Sifat penelitian verifikatif adalah untuk menguji kebenaran suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, dimana dalam penelitian ini akan menguji pengaruh regulasi, alokasi anggaran, pusat dan anggaran daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana dan implikasinya pada penciptaan lapangan pekerjaan. Mengingat penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif, maka metode penelitian yang digunakan adalah *descriptive survey* dan metode *explanatory survey*. Tipe investigasi dalam penelitian ini adalah *causalitas*. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana di Sumatera Barat. Penelitian ini termasuk pada katagori *crosssectional*, yaitu informasi dari sebagian populasi (sampel responden) dikumpulkan langsung dari lokasi secara empirik dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang diteliti yaitu regulasi, alokasi anggaran pusat dan anggaran daerah, investasi, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha, pembangunan ekonomi pasca bencana dan lapangan pekerjaan.

### Operasionalisasi Penelitian

Operasionalisasi variabel yang dimaksud adalah seperti pada Tabel 4. berikut ini:

**Tabel 4. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR	SKALA
Regulasi, (X <sub>1</sub> )	Penyusunan Regulasi	Perencanaan perencanaan penyusunan	Ordinal
		Pelibatan pihak-pihak yang menyusun regulasi	
		Penetapan regulasi	
	Sosialisasi dan pemahaman regulasi	Sosialisasi Regulasi	Ordinal
		Upaya – upaya dalam pemahaman Regulasi	
	Implementasi dan Evaluasi Regulasi	Implementasi Regulasi	Ordinal
	Evaluasi Regulasi		
Alokasi anggaran, (X <sub>2</sub> )	Alokasi Anggaran Pusat	Besaran Anggaran	Ordinal
		Kemudahan dalam pengeluaran dan pengelolaan anggaran	

		Kemudahan dalam pertanggung jawaban anggaran	
	Alokasi Anggaran Daerah	Besaran Anggaran	Ordinal
		Kemudahan dalam pengeluaran dan pengelolaan anggaran	
		Kemudahan dalam pertanggung jawaban anggaran	
	Alokasi Dana Sumbangan - Sumbangan	Bentuk Sumbangan	
		Besaran Sumbangan	
		Peruntukan Sumbangan	
<b>Investasi Di daerah (X<sub>3</sub>)</b>	Perijinan investasi	Kemurahan Biaya perijinan	Ordinal
		Kualitas Kecepatan pengurusan	
	Ketersediaan infrastruktur	Ketersediaan transportasi	Ordinal
		Ketersediaan telekomunikasi, energi, air bersih	
Jaminan keamanan	Gangguan keamanan	Ordinal	
	Kepastian dan kelanjutan usaha		
Ketersediaan Kualitas sumberdaya	Kualitas Sumberdaya manusia Kualitas Sumber finansial	Ordinal	
<b>Tata kelola Pemda (X<sub>4</sub>)</b>	Efisiensi Kerja Pemda	Adanya Efisiensi penggunaan Input	Ordinal
		Adanya Efisiensi dalam pelaksanaan proses	
	Efektivitas Kerja Pemda	Adanya Produktivitas pelaksanaan proses	Ordinal
		Adanya Efektivitas perolehan Output	
Tindakan yang Ekonomis	Kecilnya terjadinya KKN	Ordinal	
	Udahnya pelaksanaan pengawasan		
Produktivitas Kerja Aparatur	Kualitas dan peningkatan Aparatur	Ordinal	
	Mudahnya pelaksanaan pengawasan		
<b>Peranan masyarakat, ( X 5 )</b>	Pemahaman Terhadap Masalah Bencana	Pemahaman terhadap gempa dan tsunami	Ordinal
		Pemahaman terhadap tindakan pengamanan darurat terhadap gempa dan tsunami	
	Kemampuan Terhadap Penanganan Bencana	Kemampuan pengetahuanl	Ordinal
		Kemampuan Teknikal	
Kemampuan dalam pelaksanaan penanganan pasca Bencana			
Keikut Sertaan Dalam membantu Pihak lainnya	Bantuan tenaga dan pemikiran	Ordinal	
	Bantuan Finansial		

<b>Peranan dunia usaha (X 6)</b>	Pemahaman Terhadap Masalah Bencana	Pemahaman terhadap gempa dan tsunami	Ordinal
		Pemahaman terhadap tindakan pengamanan darurat terhadap gempa dan tsunami	
	Kemampuan Terhadap Penanganan Bencana	Kemampuan konseptual	Ordinal
		Kemampuan Teknikal	
		Kemampuan dalam pelaksanaan penanganan Bencana	
	Keikut Sertaan Dalam membantu Pemda dan Pihak lainnya	<del>Bantuan tenaga dan pemikiran</del>	Ordinal
Bantuan Finansial, sarana, dan peralatan			
<b>Pembangunan Ekonomi Pasca Bencana (Y)</b>	Pembangunan Bidang Kesehatan	Sarana dan prasarana bidang kesehatan	Ordinal
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
	Pembangunan Bidang Pendidikan	Sarana dan prasarana bidang pendidikan	Ordinal
		Peningkatan Pelayanan pendidikan	
Pembangunan Infrastruktur	Sarana dan prasarana bidang infrastruktur	Ordinal	
	Peningkatan Pelayanan infrastruktur Pembangunan jalan, Jembatan , dll.		
Pembangunan Bidang Ekonomi	Peningkatan Pelayanan Ekonomi Sarana dan Prasarana Bidang ekonomi	Ordinal	
<b>Penciptaan Lapangan Pekerjaan (Z)</b>	Serapan tenaga Kerja pada saat Rekonstruksi Pembangunan	Serapan tenaga kerja yang langsung pada aktivitas pembangunan fisik	Ordinal
		Serapan tenaga kerja yang langsung pada aktivitas jasa pendukung pembangunan fisik	
	Serapan tenaga Kerja pada saat Sesudah Rekonstruksi Pembangunan	Serapan tenaga kerja yang langsung dan tidak langsung pada aktivitas hasil pembangunan fisik	Ordinal
		Serapan tenaga kerja yang tidak langsung pada aktivitas jasa pendukung setelah pembangunan fisik	

### Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan *probability sampling*, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah petugas penanganan bencana yaitu berbagai pihak yang terkait dengan penanganan bencana dan rekonstruksi pasca bencana, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten di Sumatera Barat.

**Tabel 5. Petugas Penanganan Bencana**

No.	Tempat	Jumlah Petugas
1	Provinsi	100 orang
2	Kota / Kabupaten	700 orang
Jumlah		800 orang

Sumber : Pemda Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel 5. di atas, maka jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 800 orang yang tersebar di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.

Penelitian ini direalisasikan dengan mengambil sampel dari seluruh anggota populasi. Responden dalam penelitian ini adalah personal yang berkaitan dengan penanganan bencana di Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Sumatera Barat. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah, teknik sampling berganda, dimana tahap pertama ; dengan menggunakan

$$s = \frac{x^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + x^2 \cdot P \cdot Q}$$

$$= \frac{2,706 \times 800 \times 0,5 \times 0,5}{(0,05)^2 \cdot (800 - 1) + (2,706) \times (0,5) \times (0,5)}$$

$$s = \frac{541,2}{1,9975 + 0,0067}$$

$s = 270,032$  dibulatkan menjadi 270

### Teknik Analisis Data

Teknik pengukuran yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian adalah menggunakan skala Likert dengan ordinal pengukuran sebanyak lima tingkatan (Sekaran, 2000; Irawan, 2002; dan Sugiono, 2008).

Skala ordinal adalah skala pengukuran yang menyatakan kategori dan peringkat *construct* yang diukur. Peringkat nilai menunjukkan suatu urutan penilaian atau tingkat preferensi secara relatif (Indriantoro, 2002).

Untuk meneliti pengaruh regulasi, alokasi anggaran, pusat dan anggaran daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha, pembangunan ekonomi pasca bencana dan implikasinya pada penciptaan lapangan pekerjaan diperlukan data primer. Untuk mendapatkan data primer tersebut digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan komunikasi baik secara

cluster random sampling, sedangkan pada tahap kedua; dengan menggunakan *purposive sampling* guna penetapan besaran anggota sampel dari masing-masing kelompok.

### Penetapan Anggota Sampel Penelitian

Penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan oleh Issac and Michael untuk tingkat kesalahan sebesar 5 persen (Sugiono, 2008) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

langsung (tatap muka) ataupun tidak langsung melalui media komunikasi dengan pihak-pihak yang kompeten dalam penanganan bencana dan pembangunan rekonstruksi pasca gempa.

b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung pada subjek penelitian untuk memperoleh data yang representatif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh responden. Kuesioner didesain dalam bentuk pernyataan terstruktur, dimana pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam memberikan jawaban kepada beberapa alternatif saja ataupun kepada satu jawaban saja.

Disamping itu, untuk mendeskripsikan penelitian ini dilengkapi pula dengan data skunder yang diperoleh dengan cara mengutip catatan, dokumentasi atau laporan-laporan yang berkaitan dengan objek yang diteliti serta pedoman-pedoman yang dikeluarkan masing-masing pihak yang terkait.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer dan skunder. Data primer bersumber dari survey ke lapangan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner, sedangkan data skunder bersumber dari dokumentasi atau laporan-laporan yang berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami serta pedoman-pedoman dan informasi yang dikeluarkan pihak yang terkait dengan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

### Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi variabel independen yang diteliti. Untuk mengidentifikasi variabel independen yang diteliti digunakan metode *interval score* dengan pembagian median. Cara perhitungan *interval score* dengan pembagian median adalah sebagai berikut :

- 1) Menghitung skor nilai dari masing-masing variabel dengan cara : jumlah responden x jumlah butir pertanyaan x skor item masing-masing pertanyaan
- 2) Menghitung skor standar (pembanding) untuk setiap variabel independen dengan cara : menghitung kuartil 2 (median) yaitu : jumlah responden x jumlah butir pertanyaan x 3\*
- 3) Catatan : \* angka 1,2,3,4,5 adalah skor item pernyataan pada skala Likert.
- 4) Pedoman untuk pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan skor nilai pada poin (1) dan (2), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bila jumlah skor atau skor nilai pernyataan (1) lebih kecil (rendah) daripada nilai pembanding (median) maka berarti lemah. Artinya bahwa variabel independen tersebut tidak dimiliki atau tidak digunakan atau tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

- b. Bila jumlah skor atau skor nilai pernyataan (1) lebih besar (tinggi) daripada nilai pembanding (median) maka berarti kuat. Artinya bahwa variabel independen tersebut tidak dimiliki digunakan atau berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### Rancangan Analisis

Berdasarkan para paradigma dan hipotesis penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis jalur (*path analysis*). Dalam analisis jalur langkah pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu menterjemahkan hipotesis penelitian ke dalam diagram jalur. Metode statistika dengan analisis jalur digunakan untuk mengukur pola hubungan yang mengisyaratkan besarnya pengaruh beberapa variabel penyebab (eksogen) terhadap variabel akibat (endogen).

Pemilihan metode analisis jalur dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

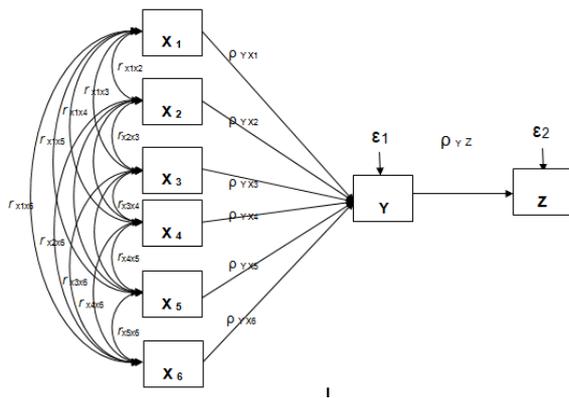
- a. Metode ini mampu memberikan kejelasan hubungan dan besaran antar variabel penelitian yang sangat berguna bagi upaya peneliti dalam mengupas secara lebih dalam berbagai variabel yang diteliti.
- b. Analisis jalur cocok digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat, baik untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung
- c. Analisis jalur cocok untuk sampel yang melebihi atau diatas 100 responden dan data diolah bersifat exploratory serta data dapat diobservasi secara langsung di lapangan (Sitepu, 1994; Kusnendi, 2005; Yonathan Sarwono, 2007).

Analisis jalur ini mengikuti pola struktural atau disebut model struktural (Kusnendi, 2005). Model struktural secara umum dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = f (X_1, X_2, X_3, \dots, X_k);$$

$$Y = f (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, );$$

Diagram jalur dan persamaan struktural penelitian ini adalah seperti terlihat pada Gambar 3 sebagai berikut:



**Gambar 3 Diagram Jalur Penelitian**

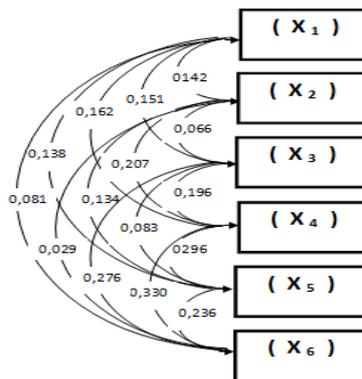
Keterangan :

- $X_1$  = Regulasi
- $X_2$  = Alokasi anggaran pusat dan daerah.
- $X_3$  = Investasi di Daerah
- $X_4$  = Tata kelola pemda,
- $X_5$  = Peranan masyarakat,
- $X_6$  = Peranan dunia usaha
- $Y$  = Pembangunan ekonomi pasca bencana.
- $Z$  = Penciptaan lapangan pekerjaan
- $\epsilon$  = Epsilon

## HASIL & PEMBAHASAN

### Objek Penelitian.

1. Hubungan antara variabel regulasi, Alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, dan peranan dunia usaha



**Gambar 4. Hubungan antara variabel bebas X**

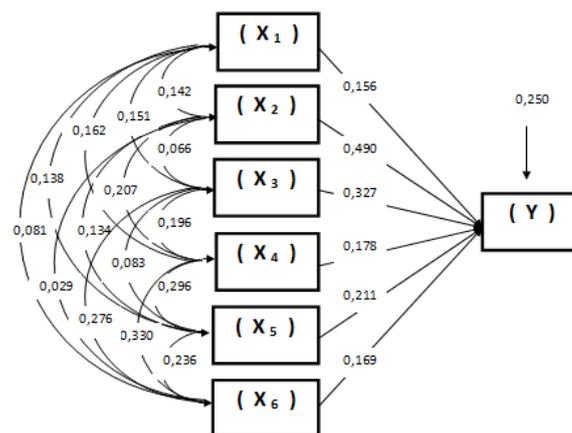
Secara rinci keerratan kriteria korelasi adalah sebagai berikut :

- 1) Hubungan variabel antara Regulasi ( $X_1$ ), dengan Alokasi anggaran pusat ( $X_2$ ) diperoleh nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,142
- 2) Hubungan variabel antara Regulasi ( $X_1$ ), investasi daerah, ( $X_3$ ), diperoleh nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,151.
- 3) Hubungan variabel antara Regulasi ( $X_1$ ), dengan tata kelola pemda, ( $X_4$ ), diperoleh nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,162

- 4) Hubungan variabel antara Regulasi ( $X_1$ ), dengan peranan masyarakat, ( $X_5$ ), diperoleh nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,138.
- 5) Hubungan variabel antara Regulasi, ( $X_1$ ), dengan peranan dunia usaha ( $X_6$ ), diperoleh nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,081.
- 6) Hubungan variabel antara Alokasi anggaran pusat dan daerah, ( $X_2$ ), dengan investasi daerah, ( $X_3$ ), diperoleh nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,066.
- 7) Hubungan variabel antara Alokasi anggaran pusat dan daerah, ( $X_2$ ), dengan tata kelola pemda, ( $X_4$ ), diperoleh nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,207.
- 8) Hubungan variabel antara Alokasi anggaran pusat dan daerah, ( $X_2$ ), dengan peranan masyarakat, ( $X_5$ ), diperoleh nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,134.
- 9) Hubungan variabel antara anggaran pusat dan daerah, ( $X_2$ ), dengan peranan dunia usaha ( $X_6$ ), diperoleh nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,029.
- 10) Hubungan variabel antara investasi daerah, ( $X_3$ ), dengan tata kelola ( $X_4$ ), diperoleh nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,196.
- 11) Hubungan variabel antara investasi daerah, ( $X_3$ ), dengan peranan masyarakat, ( $X_5$ ), diperoleh nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,083.
- 12) Hubungan variabel antara investasi daerah ( $X_3$ ), dengan peranan dunia usaha ( $X_6$ ), diperoleh nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,276.
- 13) Hubungan variabel antara tata kelola pemda, ( $X_4$ ), dengan peranan masyarakat, ( $X_5$ ), diperoleh nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,296.
- 14) Hubungan variabel antara tata kelola pemda, ( $X_4$ ), dengan peranan dunia usaha ( $X_6$ ), diperoleh nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,330.
- 15) Hubungan variabel antara peranan masyarakat, ( $X_5$ ), dengan peranan dunia usaha ( $X_6$ ), diperoleh nilai koefisien korelasi yang sebesar 0,236.

#### Analisis pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

#### Pengaruh Bersamaan dan Parsial Variabel regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca gempa di Provinsi Sumatera Barat



**Gambar 5. Analisis Jalur Untuk Pengaruh variabel X terhadap Variabel Y**

Dari gambar tersebut di atas, maka dapat menjelaskan derajat asosiatif/koefisien jalur dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel

terikat, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 6. Koefisien Jalur Jalur  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ , terhadap variabel Y**

Variabel	Koefisien Jalur
Regulasi, ( $X_1$ )	0,156
Alokasi anggaran pusat dan daerah, ( $X_2$ )	0,490
Investasi daerah, ( $X_3$ )	0,327
Tata kelola pemda, ( $X_4$ )	0,178
Peranan masyarakat ( $X_5$ )	0,211
Peranan dunia usaha ( $X_6$ )	0,169

Dari tabel di atas, maka dapat diperoleh persamaan jalur, yaitu :

$$Y = 0,156 X_1 + 0,490 X_2 + 0,327 X_3 + 0,178 X_4 + 0,211 X_5 + 0,169 X_6 + \varepsilon_i$$

Dimana :

Y = Pembangunan ekonomi pasca bencana

$X_1$  = Regulasi,

$X_2$  = Alokasi anggaran pusat dan daerah,

$X_3$  = Investasi daerah,

$X_4$  = Tata kelola pemda,

$X_5$  = peranan masyarakat,

$X_6$  = Peranan dunia usaha

$\varepsilon_i$  = Pengaruh variabel lain diluar  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$ , dan  $X_6$

Dari persamaan di atas dapat di artikan bahwa :

1. Terdapat hubungan asosiatif regulasi, terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana. yang besarnya, sebesar 0,156 ( $\rho_{YX_1}$ )
2. Terdapat hubungan asosiatif Alokasi anggaran pusat dan daerah, terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana. yang besarnya, sebesar 0,490 ( $\rho_{YX_2}$ )
3. Terdapat hubungan asosiatif investasi daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana. yang besarnya , sebesar 0,327. ( $\rho_{YX_3}$ )
4. Terdapat hubungan asosiatif tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana. yang besarnya, sebesar 0,178 ( $\rho_{YX_4}$ )
5. Terdapat hubungan asosiatif peranan masyarakat, terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana yang besarnya 0,211 ( $\rho_{YX_5}$ )
6. Terdapat hubungan asosiatif peranan dunia usaha terhadap

pembangunan ekonomi pasca bencana. yang besarnya 0,169 ( $\rho_{YX_6}$ )

Adapun pengaruh langsung dan tidak langsung secara bersamaan dari variabel Regulasi ( $X_1$ ), Alokasi anggaran pusat dan daerah, ( $X_2$ ), investasi daerah, ( $X_3$ ), tata kelola pemda, ( $X_4$ ) peranan masyarakat, ( $X_5$ ), peranan dunia usaha ( $X_6$ ) terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana (Y), adalah sebagai berikut :

#### **Besaran Pengaruh Langsung :**

1. Variabel regulasi ( $X_1$ ), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) sebesar 2,43% ( $R^2_{YX_1}$ ),
2. Variabel alokasi anggaran pusat dan daerah ( $X_2$ ), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana sebesar 24,01 % ( $R^2_{YX_2}$ ),
3. Variabel investasi daerah, ( $X_3$ ), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) sebesar 10,69 % ( $R^2_{YX_3}$ ),

4. Variabel tata kelola pemda, ( $X_4$ ) mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) sebesar 3,16 % ( $R^2 yx_4$ ),
5. Variabel peranan masyarakat ( $X_5$ ), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) sebesar 4,45 % ( $R^2 yx_5$ ),
6. Variabel peranan dunia usaha ( $X_6$ ), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) sebesar 2,85 % ( $R^2 yx_6$ ),
4. Besaran pengaruh tidak langsung variabel tata kelola ( $X_4$ ) melalui kelima variabel bebas lainnya terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) sebesar 5,48 % ( $R^2 yx_4$ ).
5. Besaran pengaruh tidak langsung variabel peranan masyarakat ( $X_5$ ) melalui kelima variabel bebas lainnya terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) sebesar 4,49% ( $R^2 yx_5$ ).
6. Besaran pengaruh tidak langsung variabel peranan dunia ( $X_6$ ) melalui kelima variabel bebas lainnya terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) sebesar 3,94 % ( $R^2 yx_6$ ).

**Besaran Pengaruh Tidak langsung**

1. Besaran pengaruh tidak langsung variabel Regulasi, ( $X_1$ ) melalui Kelima variabel bebas lainnya terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) sebesar 2,96 % ( $R^2 yx_1$ ).
2. Besaran pengaruh tidak langsung variabel alokasi anggaran ( $X_2$ ), melalui kelima variabel bebas lainnya terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) sebesar 5,55 % ( $R^2 yx_2$ ).
3. Besaran pengaruh tidak langsung variabel investasi daerah ( $X_3$ ) , melalui kelima variabel bebas lainnya terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) sebesar 5,05 % ( $R^2 yx_3$ ).

Adapun besaran pengaruh total (koefisien determinasi) dari variabel regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana. dinyatakan oleh besaran koefisien determinasi yang besarnya adalah sebesar 75,06 % sedangkan pengaruh variabel lain di luar model adalah sebesar 24,94 %.

Untuk lebih jelasnya,dapat di lihat dalam tabel 7 di bawah ini :

**Tabel 7. Pengaruh langsung dan tidak langsung  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$  terhadap Y**

Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung						Total Pengaruh Tdk langsung	Sub. Total pengaruh
		X1	X2	X3	X4	X5	X6		
X1	0,0243		0,0108	0,0077	0,0045	0,0045	0,0021	0,0296	0,0539
X2	0,2401	0,0108		0,0105	0,0180	0,0138	0,0024	0,0555	0,2956
X3	0,1069	0,0077	0,0105		0,0114	0,0057	0,0152	0,0505	0,1574
X4	0,0316	0,0045	0,0180	0,0114		0,0111	0,0099	0,0548	0,0864
X5	0,0445	0,0045	0,0138	0,0057	0,0111		0,0098	0,0449	0,0894
X6	0,0285	0,0021	0,0024	0,0152	0,0099	0,0098		0,0394	0,0679
<b>Total</b>									0,7506

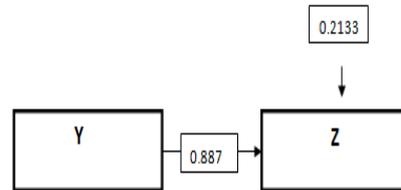
Berdasarkan Tabel 7 di atas, dapat menjelaskan bahwa besaran pengaruh dari masing-masing variabel  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$  dan  $X_6$  sebagai berikut :

1. Adapun besaran pengaruh parsial dari variabel regulasi ( $X_1$ ), terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) baik pengaruh langsung maupun tidak langsung sebesar 5,39 % ( $R^2_{yx_1}$ ),
2. Adapun besaran pengaruh parsial dari variabel Alokasi anggaran pusat dan daerah ( $X_2$ ), terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) baik pengaruh langsung maupun tidak langsung sebesar 29,56 % ( $R^2_{yx_2}$ ),
3. Adapun besaran pengaruh parsial dari variabel investasi daerah, ( $X_3$ ), terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) baik pengaruh langsung maupun tidak langsung, sebesar 15,74 % ( $R^2_{yx_3}$ ),
4. Adapun besaran pengaruh parsial dari variabel tata kelola pemda, ( $X_4$ ) terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) baik pengaruh langsung maupun tidak langsung, sebesar 8,64 % ( $R^2_{yx_4}$ ),
5. Adapun besaran pengaruh parsial dari variabel peranan masyarakat ( $X_5$ ), terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) baik pengaruh langsung maupun tidak langsung, sebesar 8,94 % ( $R^2_{yx_5}$ ),
6. Adapun besaran pengaruh parsial dari variabel peranan dunia usaha ( $X_6$ ), terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana (Y) baik pengaruh langsung maupun tidak langsung, sebesar 6,79 % ( $R^2_{yx_6}$ ),

**Pengaruh variabel pembangunan ekonomi pasca bencana (Y), terhadap variabel penciptaan lapangan pekerjaan (Z).**

Analisis jalur variabel pembangunan ekonomi pasca bencana (Y), terhadap variabel

penciptaan lapangan pekerjaan (Z) dapat dilukiskan dalam Gambar 6 di bawah ini :



**Gambar 6. Pengaruh variabel pembangunan ekonomi pasca bencana terhadap variabel penciptaan lapangan pekerjaan**

Dari gambar tersebut di atas, maka dapat kita jelaskan besaran derajat asosiatif atau koefisien jalur dari variabel variabel pembangunan ekonomi pasca bencana terhadap variabel penciptaan lapangan pekerjaan, besaran koefisien jalurnya sebesar 0,887.

Adapun persamaan jalur, sebagai berikut :

$$Z = 0,887 Y + \varepsilon_2$$

Dimana :

Z = Penciptaan lapangan pekerjaan

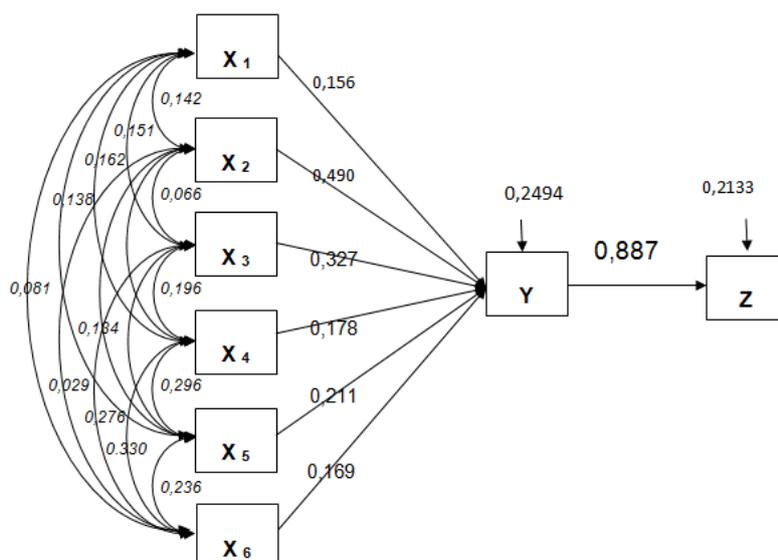
Y = Pembangunan ekonomi pasca bencana

$\varepsilon_2$  = Pengaruh variabel lain diluar model

Adapun besaran pengaruh pembangunan ekonomi pasca bencana (Y), terhadap variabel penciptaan lapangan kerja (Z), adalah sebesar 88,7%, sedangkan pengaruh variabel lain diluar model ( $\varepsilon_2$ ) sebesar 21,33%.

**Model Analisis Gabungan**

Berdasarkan analisis jalur dari masing masing sub struktur model yang dilakukan yang telah ditetapkan, maka hasil keseluruhan dari analisis tersebut dapat dilukiskan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 7. Model Analisis Jalur Secara Gabungan

**Pengujian Kelayakan Model Penelitian.**

Berdasarkan hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa model penelitian telah memenuhi karakteristik *the goodness of an econometric model* (Kautsianis dalam Yuyun wirasasmita, 2007).

**Theoretical plausibility:** Model penelitian ini memperlihatkan bahwa hasil uji sesuai dengan ekspektasinya dan teori manajemen bencana, kinerja kelembagaan dan pembangunan daerah, serta lapangan pekerjaan menjadi dasar pemikirannya.

**Tabel 8. Hasil Uji Kesesuaian Teori**

Hubungan Antar Variabel	Pra estimasi	Pasca estimasi	Kesesuaian
Pengaruh regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola , peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat	+	+	Sesuai
Pengaruh pembangunan ekonomi pasca bencana terhadap penciptaan lapangan pekerjaan di Sumatera Barat	+	+	Sesuai

**1) Accuracy of the estimates of the parameters.**

Model penelitian ini menghasilkan estimator koefisien jalur yang akurat atau tidak bias dan signifikan. Asumsi analisis terpenuhi dan probabilitas kesalahan statistik dari model sangat rendah atau  $p\text{-value} < 5\%$  ( $p\text{-value}=0,000$ ).

**2) Explanatory ability.** Model penelitian ini memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan hubungan antar fenomena variabel manajemen yang dikaji. Standard Error (SE) lebih kecil daripada  $\frac{1}{2}$  kali nilai mutlak koefisien jalurnya ( $SE < \frac{1}{2} \rho_i$ )

Terdapat pengaruh dari variabel regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat :

- SE Regulasi, =  $0,021 < \frac{1}{2} (0,156)$
- SE Alokasi anggaran pusat dan daerah =  $0,029 < \frac{1}{2} (0,490)$
- SE Investasi daerah =  $0,040 < \frac{1}{2} (0,327)$
- SE Tata kelola =  $0,030 < \frac{1}{2} (0,178)$
- SE Peranan masyarakat =  $0,043 < \frac{1}{2} (0,211)$
- SE Peranan dunia usaha =  $0,028 < \frac{1}{2} (0,169)$

Sub Struktur Kesatu :

### Sub Struktur Kedua :

Terdapat pengaruh yang signifikan variabel pembangunan ekonomi pasca bencana terhadap penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Sumatera Barat, dimana SE pembangunan ekonomi pasca bencana terhadap penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Sumatera =  $0,024 < \frac{1}{2} (0,887)$

- 3) **Forecasting Ability.** Model penelitian ini memiliki kemampuan prediksi yang tinggi atas perilaku variabel terikat sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya koefisien determinasi model yang mendekati atau melebihi 50% dengan perincian sebagai berikut :
- a. Besaran pengaruh dari regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat, sebesar 75,06 %.
  - b. Pengaruh variabel pembangunan ekonomi pasca bencana terhadap penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Sumatera Barat sebesar 78,70 %.

## PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data secara analisis deskriptif dan analisis verifikatif dari analisis faktor - faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana yang berimplikasi kepada penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Sumatera Barat, maka perlu di tindak lanjuti dengan melakukan pembahasan secara mendalam tentang kondisi dan fenomena yang berkaitan dengan bagaimana membuat perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan penanganan bencana di Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang rawan bencana, oleh karena itu perlu adanya peningkatan kemampuan dan komitmen dari pemerintah daerah, aparatur pelayanan, masyarakat, dan dunia usaha serta pihak-pihak lainnya yang terkait dalam menghadapi bencana tersebut. Disamping itu dalam pembahasan ini akan menjelaskan secara menyeluruh dan secara komprehensif mengenai keratan hubungan di antara variabel bebas, besaran koefisien jalur dari variabel bebas terhadap variabel terikat dan besaran pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari masing variabel tersebut serta pengujian model

yang dibangun,. Untuk selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

### Pembahasan Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan berbagai pihak yang terkait (mulai dari pejabat tinggi sampai dengan petugas pelaksana, pihak lainnya yang terkait dengan penanganan bencana) Baik di tingkat provinsi, maupun tingkat kota/Kabupaten dan penganalisaan secara mendalam terhadap jawaban dari responden, serta keterkaitannya dengan teori - teori yang mendukung dan fenomena - fenomena yang terjadi di lapangan, maka perlu adanya pembahasan analisis deskriptif sebagai berikut :

- 1). Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi yang di katagorikan sebagai provinsi yang rawan dengan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami dan gunung api serta bencana lainnya. Berdasarkan data statistik yang ada maka Sumatera Barat selama 10 tahun terakhir ini, berkali-kali dilanda gempa bumi, gempa yang terakhir terjadi pada tahun 2009. Kejadian gempa terakhir ini membawa korban yang cukup besar, dimana banyak korban yang meninggal, korban cedera, serta hancurnya berbagai infrastruktur yang ada di Sumatera Barat.
- 2). Setelah terjadinya musibah gempa bumi dampak yang sangat besar, diantaranya : a). rusaknya infrastruktur yang ada, baik infrastruktur milik dan atau infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, maupun infrastruktur yang menjadi milik masyarakat dan dunia usaha, dan atau infrastruktur yang dibangun oleh masyarakat atau dunia usaha. Kerusakan ini akan berdampak sampai jangka menengah dan panjang, maka upaya pemulihan kembali (*recovery development*) dari berbagai kerusakan dan tekanan psikologis menjadi beban bagi pihak pemerintah dan masyarakat serta dunia usaha. Salah satu beban pemerintah tersebut ialah bagaimana membangun kembali infrastruktur yang hancur, pemulihan ekonomi bagi masyarakat dan bagi para pengusaha. b). Meningkatnya beban mental dan psikologis bagi masyarakat yang berkepanjangan, dikarenakan meninggalnya anggota keluarga dan cacatnya/ cideranya anggota keluarga yang permanen c). Meningkatnya beban ekonomis bagi

masyarakat dan dunia usaha yang sangat berat, d). Hilangnya kesempatan kerja bagi masyarakat, dikarena sarana dan prasarana usaha rusak berat, bahkan hilang dan hancur total.

- 3). Pada dasarnya jawaban responden terhadap seluruh item pertanyaan dalam kuesioner, sebagian besar menjawab dengan skor tersebar mulai dari yang terkecil nilai 1 sampai dengan terbesar nilai 5, demikian jawaban terbanyak diantara 3 sampai dengan 5, dengan demikian menandakan bahwa responden menjawab dengan kriteria sedang / biasa sampai dengan kriteria baik / setuju. Dengan demikian respon dari responden cukup positif atau responsif terhadap jawaban kuesioner / pengisian kuesioner yang di bagikan. Dengan demikian bahwa rata-rata penilaian dari seluruh responden terhadap seluruh item pertanyaan memberikan penilaian katagori cukup baik dan katagori baik.

### **Pembahasan Analisis Induktif Pengaruh secara Parsial dan Bersamaan Variabel bebas terhadap variabel terikat.**

Berdasarkan hasil penghitungan analisis jalur, maka diperoleh totalitas besaran pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, dari variabel regulasi ( $X_1$ ) terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat (Y) sebesar 5,39 persen. Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa semakin baiknya regulasi yang mendukung pelaksanaan penanganan bencana, maka pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat akan semakin meningkat dan semakin merata di semua sektor, serta semakin menyebar ke berbagai daerah bencana.

Namun demikian dari besaran pengaruh tersebut, menandakan bahwa regulasi yang ada selama ini belum optimal, dalam artian masih perlu di sempurnakan lagi, sehingga pelaksanaan regulasi semakin efektif. Oleh karena itu seluruh pihak yang terkait, baik di tingkat pusat, Provinsi, Kota dan Kabupaten harus terus menerus memperbaiki dan di sosialisasikan serta dilaksanakan secara konsisten.

### **Pengaruh Parsial variabel ketersediaan anggaran terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil penghitungan analisis jalur, maka diperoleh totalitas besaran pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, dari variabel ketersediaan anggaran ( $X_2$ ) terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat (Y) sebesar 29,56 persen. Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa semakin besarnya ketersediaan anggaran pusat dan anggaran daerah yang mendukung pelaksanaan penanganan bencana, maka pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat akan semakin meningkat dan semakin merata di semua sektor, serta semakin menyebar ke berbagai daerah bencana.

Namun demikian dari besaran pengaruh tersebut, menandakan bahwa ketersediaan anggaran pusat dan anggaran daerah yang ada selama ini masih terbatas, dalam artian masih perlu di ditingkatkan lagi, sehingga ketersediaan anggaran tersebut akan semakin mendukung pembangunan ekonomi pasca bencana. Oleh karena itu seluruh pihak yang terkait, baik di tingkat pusat, Provinsi, Kota dan Kabupaten harus terus menerus menambah alokasi anggaran tersebut dan mempermudah proses pencairannya.

### **Pengaruh Parsial variabel Investasi daerah terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil penghitungan analisis jalur, maka diperoleh totalitas besaran pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, dari variabel investasi daerah ( $X_3$ ) terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat (Y) sebesar 15,74 persen. Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa semakin besarnya atau meningkatnya investasi daerah pasca bencana yang mendukung pelaksanaan penanganan bencana, maka pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat akan semakin meningkat dan semakin merata di semua sektor, serta semakin menyebar ke berbagai daerah bencana.

Namun demikian dari besaran pengaruh tersebut, menandakan bahwa investasi daerah pasca bencana yang ada selama ini belum optimal, dalam artian masih perlu di tingkatkan lagi, sehingga jumlah investor semakin bertambah dan besaran investasinya semakin besar. Oleh karena itu seluruh pihak yang terkait, baik di tingkat pusat, Provinsi, Kota dan Kabupaten harus terus menerus mendorong dan mengusahakan peningkatan investasi daerah.

### **Pengaruh Parsial variabel tatakelola terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil penghitungan analisis jalur, maka diperoleh totalitas besaran pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, dari variabel tata kelola ( $X_4$ ) terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat ( $Y$ ) sebesar 8,64 persen. Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa semakin besarnya atau meningkatnya tata kelola badan penanganan bencana yang mendukung kelancaran pelaksanaan penanganan bencana, maka pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat akan semakin meningkat dan semakin merata di semua sektor, serta semakin menyebar ke berbagai daerah bencana.

Namun demikian dari besaran pengaruh tersebut, sangat kecil hal ini menandakan bahwa tata kelola badan penanganan bencana yang ada selama ini belum optimal, dalam artian masih perlu di tingkatkan lagi, sehingga pelaksanaan tata kelola badan penanganan bencana semakin efisien dan efektif. Oleh karena itu seluruh pihak yang terkait, terutama pengambil keputusan dan petugas pelaksana, baik di tingkat pusat, Provinsi, Kota dan Kabupaten harus terus menerus meningkatkan komitmennya, dedikasi dan kompetensinya.

### **Pengaruh Parsial peranan masyarakat terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil penghitungan analisis jalur, maka diperoleh totalitas besaran pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, dari variabel peranan masyarakat ( $X_5$ ) terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat ( $Y$ ) sebesar 8,94 persen. Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa semakin besarnya atau meningkatnya peranan masyarakat yang mendukung kelancaran pelaksanaan penanganan bencana, maka pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat akan semakin meningkat dan semakin merata di semua sektor, serta semakin menyebar ke berbagai daerah bencana.

Namun demikian dari besaran pengaruh tersebut masih kecil hal ini menandakan bahwa peranan masyarakat yang ada selama ini belum optimal, dalam artian masih perlu di ditingkatkan lagi, sehingga peranan masyarakat semakin bertambah

dan lebih efektif. Oleh karena itu seluruh pihak yang terkait perlu mendorong dan mengajak kepada masyarakat untuk terus menerus mengembangkan kesadaran dan partisipasi dari masyarakat tersebut.

### **Pengaruh Parsial variabel dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat**

Berdasarkan hasil penghitungan analisis jalur, maka diperoleh totalitas besaran pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, dari variabel peranan dunia usaha ( $X_6$ ) terhadap variabel pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat ( $Y$ ) sebesar 6,79 persen. Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa semakin besarnya atau meningkatnya peranan dunia usaha yang mendukung kelancaran pelaksanaan penanganan bencana, maka pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat akan semakin meningkat dan semakin merata di semua sektor, serta semakin menyebar ke berbagai daerah bencana.

Namun demikian dari besaran pengaruh peranan dunia usaha tersebut masih kecil hal ini menandakan bahwa peranan dunia usaha yang ada selama ini belum optimal, dalam artian masih perlu di sempurnakan lagi, sehingga peranan dunia usaha semakin besar dan semakin efektif. Oleh karena itu seluruh pihak yang terkait, baik di tingkat pusat, Provinsi, Kota dan Kabupaten harus terus menerus mendorong peran serta dan partisipasi peranan dunia usaha tersebut.

### **Pengaruh bersamaan pengaruh regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat.**

Berdasarkan data responden yang selanjutnya dianalisis dengan analisis jalur menyatakan bahwa variabel regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat. berpengaruh secara signifikan. Adapun besarnya pengaruh secara bersama-sama dari variabel  $X$  terhadap  $Y$  sebesar 75,06 % sedangkan sisanya sebesar 24,94 % disebabkan oleh pengaruh variabel lain

diluar model. Adapun variabel lain di luar model tersebut di antaranya : daya saing, tingkat KKN dari aparatur, pelayanan aparatur ketersediaan infrastruktur dan lainnya.

Persamaan jalur secara bersamaan adalah merupakan model persamaan jalur untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola , peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat, berpengaruh sangat signifikan, adapun persamaan jalurnya sebagai berikut :

$$Y = 0,156 X_1 + 0,490 X_2 + 0,327 X_3 + 0,178 X_4 + 0,211 X_5 + 0,189 X_6 + \varepsilon_1$$

Apabila melihat persamaan jalur tersebut di atas, maka pembangunan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat akan meningkat, apabila keenam variabel regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola, peranan masyarakat, peranan dunia usaha tersebut secara terus menerus ditingkatkan.

**Pengaruh variabel pembangunan ekonomi pasca bencana ( Y ) terhadap variabel penciptaan lapangan kerja pasca bencana di Proninsi Sumatera Barat ( Z ).**

Hasil penghitungan analisis jalur dimana dapat diketahui besaran pengaruh pembangunan ekonomi pasca bencana terhadap variabel penciptaan lapangan kerja pasca bencana di Proninsi Sumatera Barat. dapat dinyatakan dalam persamaan jalur, sebagai berikut :

$$Z = 0,887 Y + \varepsilon_2$$

Persamaan jalur tersebut di atas, menggambarkan apabila pembangunan ekonomi pasca bencana yang semakin meningkat, maka variabel penciptaan lapangan kerja pasca bencana di Proninsi Sumatera Barat akan semakin bertambah, semakin baik, dan akan semakin merata. Oleh karena itu proses percepatan pembangunan daerah yang terkena bencana tidak ada pilihan lain kecuali mempercepat proses pelaksanaan pembangunan pasca bencana dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait, dan melibatkan atau menggunakan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dengan demikian akan mampu memberikan lapangan pekerjaan, dan sekaligus memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat.

**SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis dari data sekunder dan data primer, maka dapat di simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel regulasi, Alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pertumbuhan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat dengan besar pengaruhnya sebesar 75,06 persen.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial, baik secara langsung maupun tidak langsung dari masing - masing variabel regulasi, alokasi anggaran pusat dan daerah, investasi daerah, tata kelola pemda, peranan masyarakat, peranan dunia usaha terhadap pertumbuhan ekonomi pasca bencana. di Provinsi Sumatera Barat. Adapun rincian berdasarkan urutan pengaruh adalah sebagai berikut : 1). variabel ketersediaan anggaran dengan besar pengaruhnya 29,56 persen, 2). variabel tata kelola dengan besar pengaruhnya 15,74 persen, 3). variabel peranan masyarakat usaha dengan besar pengaruhnya 8,94 persen. 4). variabel tata kelola dengan besar pengaruhnya 8,64 persen 5). variabel peranan dunia usaha dengan besar pengaruhnya 6,79 persen 6). variabel regulasi dengan besar pengaruhnya 5,39 persen.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pertumbuhan ekonomi pasca bencana terhadap penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Sumatera Barat, adapun besar pengaruhnya sebesar 88,70 persen.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

**Saran bagi Pihak Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pihak - pihak yang terkait :**

1. Perlunya regulasi yang mendorong investasi lebih memberikan insentif, yang disertai dengan peningkatan terhadap pemahaman kepada regulasi masih kurang, begitu juga dalam konsistensi pelaksanaan regulasi yang lebih konsisten.
2. Kersediaan alokasi anggaran yang ada di pusat, provinsi, kota dan kabupaten yang

- harus lebih ditingkatkan, terutama anggaran untuk tanggap darurat.
3. Investasi daerah dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan Investasi daerah pada dasarnya masih terbatas, namun demikian akibat bencana yang terjadi memberikan dampak kepada penambahan investasi di daerah, hal ini dapat dipahami, mengingat adanya bantuan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk pemulihan dan pembangunan infrastruktur yang telah rusak. Dengan demikian menambah aktivitas pembangunan mulai di laksanakan oleh pengusaha daerah, sehingga Investasi daerah meningkat.
  4. Mengingat Katagori jawaban responden untuk variabel tata kelola dikatakan cukup, hal ini dikarenakan tata kelola pemda dalam mengatasi bencana masih banyak terganggu atau belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh banyak sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah banyak yang terganggu dan banyak yang rusak sehingga tata kelola pemda menjadi tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu segera adanya upaya perbaikan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pada publik.
  5. Katagori jawaban responden untuk variabel peranan masyarakat dapat dikatakan cukup, hal ini dikarenakan peranan masyarakat yang berkaitan dengan bencana pada dasarnya belum memadai, namun demikian upaya peningkatan peranan masyarakat semakin bertambah.
  6. Katagori jawaban responden untuk variabel peranan dunia di Sumatera Barat dinyatakan baik, hal ini di karenakan banyak pengusaha daerah yang berhasil di daerahnya, begitu juga banyak pengusaha daerah yang berhasil di luar daerahnya terutama di Pulau Jawa, sehingga banyak pengusaha yang membangun kembali perusahaannya. Disamping itu mereka menjadi donatur bagi pembangunan daerah.
  7. Katagori jawaban responden untuk variabel pertumbuhan ekonomi pasca bencana di Sumatera Barat dinyatakan baik, hal ini di karenakan pertumbuhan ekonomi pasca bencana mulai meningkat seiring dengan adanya perbaikan regulasi, adanya penambahan alokasi anggaran pusat dan daerah, berkembangnya investasi daerah, semakin membaiknya tata kelola pemda, bertambahnya peranan masyarakat dan peranan dunia usaha.
  8. Katagori jawaban responden untuk variabel penciptaan lapangan pekerjaan pasca bencana di Sumatera Barat dinyatakan baik, hal ini di karenakan pertumbuhan ekonomi pasca bencana semakin meningkat, sehingga semakin bertambahnya kesempatan kerja dari berbagai sektor yang tersedia, sehingga akan mampu menampung lapangan pekerjaan baru.
  9. Dalam upaya optimalisasi penanganan bencana, baik pada saat tanggap darurat dan pascabencana, perlu adanya kelembagaan yang permanen didukung oleh regulasi yang bersipat insentif regulasi, lengkap dan tersosialisasi dengan baik , SDM yang kuat, dan ketersediaan dana darurat yang memadai dan mudah dalam pencairannya, serta selalu melakukan koordinasi dan evaluasi yang melibatkan semua pihak yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asia Disaster Preparedness Center, Thailand, ECLAC, EM-DAT, World Bank, Juni 2006
- Asian Disaster Preparedness Centre tahun 2011
- Anwar Prabu Mangkunegara, (2002), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Badan Pusat Statistik. *Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2009*
- Badan Pusat Statistik. *Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2010*
- Bapenas, Penilaian, kerusakan dan kerugian Jawa Tengah, Jabotabek, Sumatera Barat dan Bengkulu
- Boediono, 1991, *Pelayanan Prima*. Jakarta: Yayasan Kawula Muda.
- Boediono, 2009, *Ekonomi Indonesia, mau ke mana?: kumpulan esai ekonomi*, Gramedia, Jakarta
- Day, Edward, 2005. The macro Economic's impact of natural disaster ; Macro economic theory of application , departement of economic richardson univercity, Texas

- Day; George, 1994, *Market Driven Strategies Process for Creating Values*, The Free Press, New York
- Davis, D. 2002. Operation strategy, environment uncertainty, and performance: a path analytic model of industries in developing country, *Omega, International Journal of Management Science*, vol. 28, pp. 155-173.
- Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2010
- George S. Day, 1994, "The Capabilities of Market-Driven Organizations," *Journal of Marketing*, October 1994, 37-52
- Hanafie, Rita, 2010, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Heru Nugroho, 2001, *Negara Pasar, dan Keadilan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hoesada, Jan, 2006, *Disaster Recovery Planning: Manajemen Bencana Administrasi dan Akuntansi*, Komite Kerja KSAP, Jakarta
- Jusmaliani, dkk, 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamaluddin, **Rustian**, 2003, *Ekonomi Transportasi*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Makka, A. Makmur, 2008, *The true life of Habibie: cerita di balik kesuksesan*, Pustaka IIMaN, Jakarta
- Margiyani, Lusi, 2008, Penanggulangan Bencana dalam Perspektif Perempuan dan Anak, *Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 1 Juni tahun II hal, 11-22*
- Max Pohan, 2010, Pengembangan regional dan otonomi daerah pada perencanaan pembangunan nasional, Bapenas.
- Michael P. Todaro, 2000, *Economic Development*, Seventh Edition, New York University, Addison Mesley
- Mishkin, Frederic S., 2009, *Ekonomi uang Perbankan Pasar Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro & Suhardjono, (2002)., "Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi", Cetakan Pertama., BPFE-Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 1997, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Nazir, 2005, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Keenam Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rassmusen, Tobias N, 2004, Macro economic implementation of disaster, in Caribbean, IMF, Working paper, [transsmussen@imf.org.Paper](mailto:transsmussen@imf.org),
- Pearce, John A., and Robinson, Richard B., 2000, *Strategic Management: Formulation, Implementation and Control* Mc. Graw-Hill, New York.
- Robbins, Stephen P., dan Judge Tomothy A, 2007, *Organizational Behavior*, Twelfth Edition, Preason Prentice Hall., New Jersey, USA.
- Sadono 1998, *Makroekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, Cetakan Pertama. Yogyakarta; UGM
- Sevilla, Consuelo G., Jesus A. Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, and Gabriel G. Uriarte, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sudjana. 2003. *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi Bagi Peneliti*. Bandung: Tarsito
- Reksopoetranto, Soemardi. 1992, *Managemen Proyek Pembangunan*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Steven J. Carlson, D.J. Parker; 1998, *Disaster Recovery Planning and Accounting Information Systems*, Review of Business, Winter. USA.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Suparmoko, M., 1998, *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE
- Tampubolon, Daulat P, 2001, *Perguruan Tinggi Bermutu, Paradigms Baru Managemen Pendidikan*
- The Global Competitiveness Report 2007-2008 - World Economic Forum*
- The Global Competitiveness Report 2008-2009 - World Economic Forum*

- Todaro M, 2000, Pembangunan Ekonomi , Harris Munandar, PT.Bumi Absari. Jakarta
- UNDP, 1994, Laporan hasil studi penanganan bencana, Jakarta.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Penanggulangan bencana
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25, Pasal 4 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang - undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Partadiredja, Ace. 1977 . *Perhitungan Pendapatan Nasional* . Jakarta : LPES
- Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Pengembangan Ekonomi Wilayah Pasca Gempa Bumi di Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah, pada Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan bencana
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang *No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiklund, Johan 1999, The sustainability of the Entrepreneurial Orientation Performance, Relationship Entrepreneurialship Theory and Practice Fall, *Journey of Enterpreneurship*, Vol 21, Iss 2 p: 15-37
- Wirasmita, Yuyun, 2006, Aspek-aspek Ekonomi Mikro Perusahaan Kecil Tradisional Keluarga, Universitas Padjajaran.
- Wirasmita, Yuyun, 2007, *Uji Kelayakan Model; Extended Handout Metode Penelitian Enonomi dan Bisnis*, Bandung: UNPAD
- Wirasmita, Yuyun. 2011. *Kewirausahaan Extended Handout Bandung Kewirausahaan: Bandung: UNPAD*